

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK
KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi

NIM : 115010107111091



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK PIDANA
KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi

b. NIM : 115010107111091

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Eny Harijati, S.H., M.Hum.
NIP. 1959040 619860 1 2001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Yuliati, S.H., LLM.
NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)

Oleh:

KHARIR MOHAMMAD MUSTAQIM ASTSTAQOFI

115010107111091

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.

NIP. 1960620 198903 1 002

NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya

Dr. Yuliati, S.H.,LLM.

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 19660710 199203 2 003

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap terkahir penulisan skripsi dengan judul "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)." Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setiawan Nurdyasakti SH.,MH selaku dosen pembimbing ke 1 dan Ibu Eny Harjati SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing ke 2 yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan memberikan pembimbingan, pemikiran dan pengarahan ke arah yang lebih baik dan benar serta meluangkan waktunya dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selain itu pada itu dengan selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari peranan dan dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. **Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Dr. Yuliati, S.H., LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.**
3. **Orang tua penulis dan keluarga yang selalu memberikan semangat tanpa putus asa, terutama Ibu penulis yang selalu setia**

menemani, mendoakan, serta memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Yuli Hartono, Bc.IP., S.H., selaku Ketua Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

5. Bapak Andi Hasyim, A.Amd.IP., S.H., selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang banyak membantu penulis selama dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengumpulkan data-data, memberikan pengalaman, dan cara belajar kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

6. Bapak Syahril Effendi DM, A.Md.IP., S.H., selaku Kepala Bagian Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja yang membantu penulis selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam mengumpulkan data penelitian dan pengalaman baru.

7. Beberapa Narapidana Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar yang membantu penulis untuk mendapatkan data-data dan pengalaman berharga serta kenang-kenangan dari beberapa Narapidana selama melakukan kegiatan penelitian dalam Lembaga Pemasyarakatan.

8. Seluruh karyawan dan staff Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis.

10. Seluruh karyawan dan staff lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya Malang, yang telah banyak membantu penulis selama dalam masa kuliah.

11. Sahabat penulis dari Kasmarun Tulungagung Coco, Safuvk,

Cethe, Cungkring, Raka, Agista, Tyas, Reyhan, Om Rorey,

Marijan, Ndomble, Gandul, Atta, dan masih banyak yang lain

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang dengan

kekonyolan mereka menyemangati penulis dengan cara yang

berbeda.

12. Sahabat penulis dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Komang, Endroe, Nandaru, Bugi, Willy, Indra, Aditya, Dhony,

Isaac, Bagus, Dio, Dhimas, Nuri, Himawan, Oky, Bayu, Faizal,

dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu

memberi semangat, kekompakan serta kerjasamanya selama

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan

memotivasi penulis agar lulus dengan segera.

13. Sahabat penulis dari Tulungagung yang tinggal di Malang Ryan,

Yusuf, Awang, Lutfi, Sony, Ivan, Bram, Prana, Reza yang selalu

menemani penulis Ngopi dan menyegarkan otak serta

memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Keluarga KKN Dusun Jambuer Desa Balesari 2014 yang memberikan kenangan manis, konyol, horor dan pengalamannya akan selalu saya ingat sampai sekarang.

15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada seluruh pihak yang penulis sebutkan diatas serta pihak-pihak lain yang belum penulis sebutkan di atas, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan berkah dan imbalan dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2016

Kharir Mohammad MA

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Abstraksi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Hukum Narapidana	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Teori-Teori Perlindungan Hukum	18
3. Pengertian Narapidana	19
4. Hak-Hak Narapidana	19
B. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
C. Kajian Umum Mengenai Teori Hukuman	27
1. Teori-Teori Hukuman	27

2. Hukuman Pokok	30
3. Hukuman Tambahan	32
D. Kajian Umum Mengenai Teori Kriminologi	33
E. Kajian Umum Mengenai Kekerasan	36
1. Pengertian Kekerasan	36
2. Teori-Teori Kekerasan	37
3. Macam-Macam Kekerasan	39
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan	40
5. Jenis-Jenis Kekerasan	40
6. Macam-Macam Perilaku Kekerasan	41
F. Kajian Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan	41
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	42
2. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keamanan Lembaga Pemasyarakatan	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Populasi dan Sampel	52
G. Teknik Analisis Data	53
H. Definisi Operasional	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	57
1. Sejarah Singkat	57
2. Visi, Misi, dan Motto	65
3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	67
4. Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	68
5. Kegiatan Narapidana Selama Berada Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	69
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar Dalam Menanggapi Tindak Kekerasan Antar Narapidana Dalam Lapas	82
1. Faktor yang Menyebabkan Terjadi Kekerasan Antar Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	98
C. Kendala-Kendala Yang Dialami Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar Dalam Menanggapi Tindak Kekerasan Antar Narapidana Dalam Lapas	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 Kapasitas Hunian	59
Tabel 3 Keadaan Jumlah Narapidana dan Tahanan	60
Tabel 4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Responden	61
Tabel 5 Keadaan Peralatan Inventaris Kantor	63
Tabel 6 Jumlah Kepegawaian Per-Bulan April 2015	74
Tabel 7 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	75
Tabel 8 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	76
Tabel 9 Bentuk Pelayanan Perlindungan Yang Diberikan Pihak Lapas Kepada Narapidana Menurut Jawaban Responden	84
Tabel 10 Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Pihak Lapas Kepada Narapidana Ketika Terjadi Kekerasan Antar Narapidana Menurut Jawaban Responden	86
Tabel 11 Bentuk Pelayanan Keamanan Yang Diberikan Pihak Lapas Kepada Narapidana Menurut Jawaban Responden	88
Tabel 12 Bentuk Pembinaan Yang Diberikan Pihak Lapas Kepada Narapidana Menurut Jawaban Responden	94
Tabel 13 Tindak Kekerasan Dari Tahun ke Tahun	99
Tabel 14 Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Narapidana Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Narapidana	100
Tabel 15 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Narapidana Menurut Jawaban Responden	101
Tabel 16 Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Antar Narapidana	104
Tabel 17 Pendapat Responden Mengenai Bobot Sanksi Yang Diberikan	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Blitar 73



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Surat Permohonan Pra Ijin Survey
5. Surat Permohonan Ijin Survey
6. Surat Ijin Survey dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur
7. Surat Keterangan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar
8. Kartu Bimbingan Skripsi
9. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk
Kepentingan Akademis
10. Kumpulan Foto-Foto Saat Penelitian

RINGKASAN

Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar), Setiawan Nurdayasakti SH.,MH., Eny Harjati SH., M.Hum.

Pada skripsi ini, ini penulis mengangkat masalah Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana. Hal ini dilatar belakangi oleh lemahnya sistem pembinaan, perlindungan, dan keamanan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan masih maraknya kasus-kasus mengenai terjadinya kekerasan antar narapidana bahkan sampai ada yang menimbulkan kematian. Faktor pembinaan, perlindungan, dan keamanan merupakan faktor utama dalam sistem pemasyarakatan untuk proses pengembalian warga binaan kepada masyarakat. Maka diharapkan Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan pembinaan, perlindungan, dan keamanan yang terjamin untuk warga binaannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mampu menyadari kesalahannya, dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II B Blitar? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas Klas II B Blitar?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana serta kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarkatan Klas II B Blitar dalam memberikan upaya perlindungan tersebut.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode Hukum Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dengan teknik kualitatif dan diolah menggunakan teknik analisis data secara deskriptif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya-upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana. Upaya-upaya berupa peningkatan fungsi layanan pembinaan narapidana, peningkatan fungsi layanan

perawatan narapidana maupun tahanan, peningkatan fungsi layanan informasi dan komunikasi kepada publik, peningkatan fungsi layanan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, peningkatan fungsi layanan perkantoran, dan peningkatan fungsi layanan perencanaan penganggaran dan pelaporan. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadi tindak kekerasan antar narapidana masalah utamanya terletak pada overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kurangnya perhatian pemerintah mengenai sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menimbulkan kendala-kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam melakukan peningkatan pelayanan fungsi dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menyingkapi fakta-fakta tersebut diatas, maka diharapkan pemerintah mampu untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.



SUMMARY

Kharir Mohammad Aststaqofi Mustaqim, Criminal Law, Faculty of law, University of Brawijaya February 2016, THE EFFORTS Of CORRECTIONAL FACILITY IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO THE INMATES FROM ACTS OF VIOLENCE BETWEEN INMATES (Studies in Correctional Facility Class Blitar II B), Setiawan Nurdayasakti SH., MH., Eny Harjati SH, M. Hum.

On this thesis, the author raised this problem In Correctional Effort Giving legal protection to the Inmates From acts of violence Between inmates. This event will be based by the weakness of the system construction, protection, and security within the correctional facility and is still rampant cases concerning the occurrence of violence between inmates even until there is a cause of death. Factors of construction, protection, and security is a major factor in the correctional system to process refund assisted residents to the community. Then the expected correctional facility capable of providing the construction, protection, and security is assured for his citizens to be good citizens and responsible, capable of realising his error, and no longer do acts that violate the law.

Based on the background paper raised the problem formulation: (1) How the efforts of correctional facility in providing legal protection to the inmates from acts of violence between inmates in Correctional Institutions Class II B Blitar? (2) whether the constraints faced in delivering Lapas party efforts to convict legal protection from acts of violence between inmates in Correctional Institutions Class II B Blitar?

The purpose of this research is to find out and analyze about Correctional efforts Class II B of Blitar in giving legal protection to the inmates from acts of violence between inmates and the constraints faced by Correctional Class II B of Blitar in providing such protection.

Writing this paper using the method of Empirical Laws with Normative Juridical approach method and Empirical Juridical. Primary and secondary legal materials obtained by the author with the qualitative techniques and using descriptive data analysis techniques, namely by means of description or describe the data that has been collected about the legal protection of taking action against criminal acts of violence between inmates in a correctional facility.

The research results showed that there were several efforts from Correctional Institutions Class II B of Blitar in giving legal protection to the inmates from acts of violence between inmates. Efforts in the form of enhanced functionality, improved inmate coaching service functions as well as convict prisoner care services, improvement of the functions of the information and communication service to the public, increased security and order service functions in a correctional facility, Office services, enhanced functionality and increased service planning function increased budget planning and reporting. Whereas the factors the causes of acts of violence occurred between its main problem inmates on over capacity in the correctional facility and the Government's lack of attention

regarding the facilities and infrastructure in a correctional facility. It poses constraints on behalf of correctional facility Class II B of Blitar in improvement of service functions of the correctional facility.

Knowing the above facts, then the Government is expected to be able to meet the infrastructure and facilities that are in the correctional facility Class II B of Blitar and improve the quality of human resources for Correctional Officer Class II B Blitar.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat memang sudah menjadi hasrat pembawaan manusia dan merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya.

Negara sebagai organisasi masyarakat yang berkuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan-kepentingan masyarakat, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara.¹

Untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut negara menciptakan hukum. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan-kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya : berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dengan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.²

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 31.

² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 41.

Kepentingan dari perserorangan dan kepentingan-kepentingan golongan manusia itu selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan kepentingan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³

Dalam menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat timbullah konflik yang berawal dari kepentingan-kepentingan tersebut. Dari konflik kepentingan-kepentingan sebagian masyarakat yang melanggar hukum negara dihilangkan sementara kemerdekaannya atau diadili oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas yaitu bahwa dia (terpidana) adalah sementara. Terpidana akhirnya tetap di antara kita.⁴

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai yang ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Selalu menjamin segala warga

³ L.J van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 11.

⁴ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 56.

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di negara Indonesia, lapas sudah berbeda pengertian dengan penjara yang terdengar familiar di kalangan orang dulu. Dalam sistem lapas yang disesuaikan dengan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan lebih memfokuskan dalam memberikan pembinaan, bukan tempat tujuan untuk balas dendam.

Narapidana di dalam lapas jauh dari siksaan fisik maupun maupun penderitaan mental dan batin, tetapi lapas lebih mengupayakan narapidana untuk menyadari kesalahannya dan membimbing narapidana ke arah yang lebih baik. Namun, pada kenyataan di lapangan masih banyak narapidana yang menderita akibat kekerasan fisik maupun mental, karena menjadi korban kekerasan narapidana lain dalam lapas.

Penerapan azas (*Equality Before The Law*) bahwa semua orang sama di depan hukum, memberikan arti berbeda buat para narapidana yang memaksakan persamaan perlakuan dalam Lapas. Persamaan itulah yang membuat seorang narapidana dalam lingkungan dimana setiap orang atau masyarakat yang telah diadili karena melakukan kejahatan yaitu dalam Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS, memicu konflik kepentingan-kepentingan tindakan kekerasan dan pertikaian dari pelaku kejahatan yang tidak puas karena faktor-faktor tertentu, karena pertentangan dari kepentingan masing-masing individu yang menyebabkan kecemburuan sosial karena sering kali diperlakukan berbeda.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekstren dan faktor intern. Faktor ekstren yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Rutan atau Lembaga Perasyarakatan. Faktor intern, yaitu terdapat didalam tahanan maupun narapidana yang cenderung pada sifat kejiwaan serta interaksi antar tahanan dan narapidana dalam Lapas menjadi salah satu penyebab timbulnya kerusuhan dan anarki, karena antar tahanan dan narapidana saling berinteraksi didalam Lapas.⁵

Beberapa contoh kasus kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan terjadi di Lapas Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 3 Agustus 2013. Kekerasan terjadi karena aksi solidaritas sesama narapidana, dimana pada saat sore hari salah satu narapidana ketahuan menggunakan telepon seluler dan dikenai sanksi oleh petugas Lapas. Tetapi, pada malam harinya saat salat tarawih ada salah satu narapidana sedang mabuk-mabukan dan melakukan pemukulan terhadap narapidana lain dan menimbulkan kerusuhan antar narapidana dalam Lapas. Bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak Lapas Klas II B Tulungagung adalah dengan berkoordinasi dengan

⁵ Azizy, Astrid "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KERUSUHAN DAN ANARKI SERTA UPAYA PENANGGULANGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA". Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Kanwil Pemasyarakatan Jawa Timur dan memindahkan narapidana terkait kerusuhan ke Lapas lain.⁶

Perkelahian massal antara narapidana (napi) yang tinggal di Blok A dengan napi di Blok E. Pemicunya adalah perseteruan antara Sammy Key dan Berti, dua pentolan pemuda Maluku yang punya pengaruh di Lapas Cipinang pada April 2006. Untuk mencegah kerusuhan berulang, saat itu napi yang terlibat bentrok pun dipindahkan ke beberapa lapas lain. Lapas Cipinang pun dipecah dua menjadi Lapas Khusus dengan pengamanan super maksimal dan Lapas Narkotika. Namun langkah itu nyatanya tak mampu mencegah terjadi perkelahian massal, seperti kejadian April 2006 itu.⁷

Bentrok antar-tahanan terjadi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang, Jumat siang, 18 April 2014. Akibat kerusuhan itu, tiga tahanan terluka dan dilarikan ke RSUD Tangerang. Keributan terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu terjadi perang mulut di antara tahanan Blok B dengan tahanan yang menempati Blok D. Pemicunya hanya dari omong-omongan saja, kemudian berlanjut menjadi tumpukan tumpukan dengan batu.⁸

Berdasarkan hasil survey di Lapas Blitar, Kepala Lapas Blitar mengakui ada beberapa tindak kekerasan antar narapidana. Penerapan azas *Equality*

⁶ Viva News, **Kronologi Kerusuhan Lapas Tulungagung**, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434554-kronologi-kerusuhan-lapas-tulungagung> diakses pada tanggal 11 Maret 2015

⁷ Napi1708, **Kekerasan Dalam Lapas**, <http://externalnapi.blogspot.com/2007/05/kekerasan-dalam-lapas.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2015

⁸ Tempo, **LP Pemuda Tangerang Rusuh**, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/064571564/LP-Pemuda-Tangerang-Rusuh> diakses pada tanggal 11 Maret 2015

before The Law menyebabkan Lapas Blitar mengalami overload (kelebihan kapasitas) yang jumlahnya tidak main-main, sekitar 200%. Over kapasitas tersebut menyebabkan konflik-konflik yang tak terhindarkan. Jumlah kasus tindak kekerasan yang dilakukan narapidana kepada narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, kebanyakan tindak kekerasan yang dilakukan antar narapidana terjadi secara spontan dan disengaja karena kapasitas yang kurang memadai dan minimnya jumlah petugas untuk menanggapi tindak kekerasan tersebut.

Bapak Yuli Hartono menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi secara spontan antar narapidana disebabkan karena faktor-faktor seperti utang-piutang, saling mengejek atau menghina narapidana lain, dendam dari luar atau mendapat hasutan dari pihak luar, dan lebih parahnya lagi kekerasan dilakukan hanya karena sebatang rokok yang diperebutkan. Rasa iri antar napi inilah yang perlu diwaspadai.⁹

Menurut Bapak Yuli Hartono, untuk mencegah kejadian-kejadian seperti yang disebutkan, pihak Lapas mencoba mengantisipasi hal-hal tersebut untuk meminimalisir tindak kekerasan. Laporan tentang tindak kekerasan yang dilakukan narapidana dan diserahkan kepada bagian keamanan untuk memproses pelaku tindak kekerasan tersebut agar pelaku dapat di berikan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lain berupa sanksi kurungan 1 Minggu tidak mendapatkan jam istirahat untuk pelaku kekerasan ringan sedangkan untuk

⁹ Hasil Survey di Lapas Klas II B Blitar, dilaksanakan pada 11 Maret 2015

pelaku kekerasan berat diberikan sanksi berupa pencabutan remisi. Hal tersebut dilakukan agar untuk mencegah pelaku tidak melakukan kekerasan lagi.¹⁰

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan tersebut timbullah korban dari tindak kekerasan antar narapidana. Maka perlulah upaya perlindungan bagi para narapidana yang mengalami kekerasan dalam lembaga permasyarakatan. Selain perlindungan upaya pencegahan sebaiknya dilakukan oleh pihak lembaga permasyarakatan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya korban serta mencegah timbulnya kerusuhan dalam lembaga permasyarakatan demi mencapai tujuan hukum kedamaian.

Dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik, bukannya malah memperburuk keadaan seorang narapidana dalam lembaga permasyarakatan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lain. Karena hal tersebut seakan membuat lapas bukan menjadi tempat untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak menggulangi perbuatan yang tidak bertanggungjawab, sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹¹ Akan tetapi keadaan tersebut membuat penjahat-penjahat yang awal kurang pengalaman menjadi jauh lebih kejam dan berpengalaman karena belajar dari tindakan narapidana lain. Sebagai lembaga yang dibuat oleh negara peran petugas dalam lembaga permasyarakatan harus berkesinambungan dengan

¹⁰ Hasil Survey di Lapas Klas II B Blitar, dilaksanakan pada 11 Maret 2015

¹¹ Tujuan Pemasyarakatan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

masyarakat di dalamnya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang teratur walau dalam lingkup yang dibatasi dan tereliminasi dari dunia luar.

Narapidana dengan berbagai permasalahan kekurangan dan kelebihan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem pengamanan, di mana dalam implementasinya sistem pengamanan tersebut harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bersama. Apalagi para tahanan dan narapidana dalam pemenuhan kebutuhannya dan dalam interaksi yang dilakukan selama menjalani penahanan atau pidananya, sering menimbulkan pertentangan yang menimbulkan suatu tindak kekerasan baik perorangan maupun kelompok. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari bidang pengamanan adalah metode penyelesaian setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan para tahanan dan narapidana harus direspon sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru dan lebih luas. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila, hak-hak narapidana harus dilindungi dan ditegakkan oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi dan dilindungi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu dibina dan diayomi dari perlakuan tidak adil.

Negara harus menjamin keamanan warga negaranya, walaupun warga negara tersebut dalam keadaan diambil kebebasannya dan hukum pidana

sebagai pengatur dan penyelenggara kehidupan masyarakat untuk tercapainya ketertiban umum dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pemberian keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Sehingga pada saat ini telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

Tabel 1.1
Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya

N ^o .	Tahun Penelitian	Nama peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Skripsi Tahun 2013	Astrid Azizy, Universitas Brawijaya	Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya)	1. Apakah faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya?	Bahwa pada penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor kerusuhan dan anarki yang terjadi dalam Rutan bukan Lapas. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada bentuk perlindungan kepada narapidananya serta kendala-kendala yang dialami petugas Lapas dalam melaksanakan bentuk perlindungan tersebut.

2.	Skripsi Tahun 2013	Hamdan Hardiansyah, Universitas Swadaya Gunung Jati.	Penanggulangan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Di Lapas Majalengka (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Majalengka)	1. Apa yang Menjadi penyebab terjadinya kekerasan antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Majalengka? 2. Bagaimana Upaya penanggulangan tindak kekerasan antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kls II B Majalengka?	Bahwa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan peraturan perundang-undangan. dan menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan serta penanggulangannya. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada bentuk perlindungan kepada narapidananya serta kendala-kendala yang dialami petugas Lapas dalam melaksanakan bentuk perlindungan tersebut.
----	--------------------	--	---	---	---

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dimana penulis tertarik untuk meneliti tentang **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA”**. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih bentuk perlindungan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Blitar dalam mengatasi dan mencegah tindak kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II B Blitar?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas Klas II B Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II B Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas Klas II B Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam kaitannya dengan upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dari tindak kekerasan narapidana lain di Lapas Klas II B Blitar.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Masyarakat :

Sarana untuk memperoleh wawasan dan informasi mengenai peran lembaga pemasyarakatan, hak-hak narapidana, dan bentuk perlindungan untuk narapidana agar masyarakat tidak berpikiran negatif tentang penghuni lapas dan masyarakat dapat memberikan peran aktif dalam pembinaan mantan narapidana dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan menghargai mantan narapidana selayaknya masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Akademisi :

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi dan wawasan mengenai upaya lembaga permasyarakatan dalam memberikan

perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan narapidana lain dalam Lapas, khususnya dalam lingkup hukum pidana.

c. Bagi Penulis :

Memberikan suatu pengalaman yang berharga, wawasan mengenai ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana, dan ilmu pengetahuan mengenai bentuk perlindungan dan kendala-kendala yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan dalam menindak tindak pidana kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B di Blitar.

d. Petugas Lapas :

Sebagai masukan pengetahuan dan wawasan mengenai hak-hak dan tugas-tugas petugas Lapas dalam membina dan mengayomi narapidana serta memberikan antisipasi dari faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan untuk mencegah tindak kekerasan antar narapidana yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan.

e. Bagi Narapidana :

Diharapkan dapat memberikan saran dan informasi mengenai hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana dapat mengerti bagaimana mereka seharusnya diperlakukan tanpa ada diskriminasi sesama narapidana serta mendapat pembinaan dan perlindungan yang layak dari pihak lembaga pemasyarakatan untuk menciptakan kedamaian dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

f. Bagi Pemerintah :

Diharapkan dapat memberikan pemikiran dan solusi dalam menindaklanjuti narapidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan dan memberikan bantuan upaya-upaya dalam penanggulangannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menguraikan secara singkat mengenai keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai isi kajian umum dalam skripsi yaitu mengenai kajian umum tentang perlindungan hukum narapidana, kajian umum mengenai tindak pidana, kajian umum mengenai teori hukuman, kajian umum mengenai teori kriminologi, kajian umum

mengenai teori kekerasan, dan kajian umum mengenai lembaga kemasyarakatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang dan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan teori-teori terkait yang berkaitan dengan judul penelitian, dimulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis data yang digunakan dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai upaya-upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan narapidana lain dalam Lapas, pelaksanaannya, dan kendala-kendala yang dialami dalam menjalankan upaya perlindungan tersebut serta deskripsi mengenai lokasi penelitian di Lapas Klas II B Blitar.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan ringkasan dari bab-bab awal yang berupa kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Klas II B Blitar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Hukum Narapidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Utrecht)¹².

Perlindungan mempunyai arti mencegah, adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sedangkan menurut pendapat para ahli pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan suatu pengayoman dan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

¹² C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 31

diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka dalam hukum.¹³

b) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

c) Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya yang berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁵

d) Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait adanya hak dan kewajiban, yang berkaitan dalam hubungan subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dan lingkungannya.¹⁶

Suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif yaitu suatu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah membentuk suatu keputusan yang

¹³ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Alumni, Bandung, 1996, hlm.19.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 205.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 207.

¹⁶ Tesis Hukum, **Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli**, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 24 Maret 2015

definitif, maupun yang bersifat represif yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan lebih dalam penyelesaian sengketa, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum dijalankan untuk menciptakan tatanan yang tertib dalam bermasyarakat dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan masyarakat agar terlindungi.

2. Teori-Teori Perlindungan Hukum

Macam-macam teori perlindungan hukum yaitu, sebagai berikut :¹⁷

a) Teori Utilitas

Menitikberatkan pada kemanfaatan terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b) Teori Tanggungjawab

Hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian dalam arti luas, orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

c) Teori Ganti Kerugian

Perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

3. Pengertian Narapidana

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.¹⁸

Narapidana merupakan subjek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus dijauhi atau dipandang sebelah mata.¹⁹

4. Hak-Hak Narapidana

Narapidana selama dalam masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hak-haknya kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal (14) secara tegas menyatakan narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak ;

¹⁸ C.I Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5.

¹⁹ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan buku bacaan dan diperbolehkan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik
Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.²⁰

B. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit* itu. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf (pidana dan hukum), baar (dapat dan boleh), dan feit (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan)²¹.

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²² Para ahli berpandangan tentang pengertian tindak pidana sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikiro, sebagai berikut :²³

- a) J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “*perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan*”

²⁰ Hukum Online, **Hak Tahanan dan Narapidana Yang Tak Boleh Ditelantarkan**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> diakses pada tanggal 18 Maret 2015

²¹ Adam Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

²² Wirjono Prodjodikiro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, 59.

²³ *Ibid*, hlm. 75

- b) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah *suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*
- c) H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah *“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”*
- d) Simons, merumuskan strafbaar feit adalah *“suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”*

Dari empat rumusan yang dijelaskan para ahli diatas, dapat dilihat terutama pada kalimat :

- Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Yang pelakunya dapat dikenakan hukuman;
- Asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan;
- Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut menunjukan bahwa di dalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan telah ada orang yang melakukannya ada orang yang dipidana. Dan oleh sebab itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan adanya ancaman bagi siapa saja pelaku pelanggaran tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni : 1. Dari sudut teoritis; dan 2. Dari sudut Undang-Undang.

Teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum, sementara sudut dari undang-undang adalah bagaimana kenyataan dari tindak pidana dirumuskan dan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴

Dalam praktik hukum pidana, untuk memidanakan terdakwa dalam sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka mutlak harus disyartkam terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana.

Unsur-unsur tersebut adalah²⁵ :

- a) Perbuatan Manusia;
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang;
- c) Bersifat Melawan Hukum.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah²⁶:

- a) Perbuatan;
- b) Yang Dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah²⁷:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

²⁴ *Ibid*, hlm. 79.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 61.

²⁶ Adam Chazawi, *loc.cit*, hlm. 79

²⁷ *Ibid*, hlm. 80.

c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Simos, unsur tindak pidana adalah²⁸

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari unsur-unsur diatas, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Walaupun dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Sedangkan unsur rumusan dalam tindak pidana dalam Undang-Undang ada 2 yaitu : unsur subjektif yang ada pada pelaku, dan unsur objektif adalah perbuatan manusia, akibat, dan keadaan.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diketahui ada 11 unsur dalam tindak pidana yaitu²⁹:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

²⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 82.

g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

i) Unsur objek hukum tindak pidana;

j) Unsur kualitas subjek hukum pidana;

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, ada dua unsur diantaranya yaitu, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat atau ringanya ancaman, sifat, dan bentuk perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini saling berkaitan dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana dan yang berhubungan dengan akibat-akibat hukum yang penting.³⁰

Tindak pidana tersebut dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³¹

a) Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);

b) Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);

³⁰ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002, hlm. 228.

³¹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 121.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*);
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g) Berdasarkan sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria (*delicta propria*), yang dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu;
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k) Berdasarkan sudut dari beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

C. Kajian Umum Mengenai Teori Hukuman

1. Teori – Teori Hukuman

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum berhubungan erat dengan pengertian (*subjectief strafrecht*) “*jus puniendi*” merupakan hak atau kewajiban untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) “*jus punale*” sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dengan pengertian *subjectief strafrecht* atau hak mempidana, persoalan tersebut menjadi dasar dari teori-teori hukum pidana³², yaitu:³³

a) Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi

³² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 22

³³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105

orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi juga penderitaan.

b) Teori Maksud atau Tujuan (*relative/doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, ada perbedaan prevensi, yaitu :

- 1) Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (eksekusi).
- 2) Ada yang berpendapat agar prevensi, ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).

Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara :

- 1) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
- 2) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

c) Teori Relatif Modern

Bahwa menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk itu negara menjamin peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.

d) Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)

Dasar teori ini adalah gabungan dari dua teori sebelumnya. Gabungan dari dua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pejahat atau pelaku kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam 3(tiga) golongan :³⁴

- 1) Teori yang menitikberatkan kepada pembalasan yang tidak boleh melampaui batas keperluannya dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terhukum.

³⁴ Tien S. Hulukati & Gialdah Tapiansari B, **Hukum Pidana Jilid 1**, Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 13.

- 3) Teori yang menganggap bahwa kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama dan sejajar.

2. Hukuman Pokok

Hukuman pokok telah dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a) Pidana Mati (death penalty) : adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.³⁵

- b) Pidana Penjara (imprisonment) : adalah suatu sanksi pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan seorang terpidana untuk mentaati dan menjalani semua tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³⁶

Pidana penjara merupakan pidana utama di antara pidana penghilang kemerdekaan, dan pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.³⁷

- c) Pidana Kurungan : adalah hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara, dalam hal ini terdakwa melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 108

³⁶ P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.

69.

³⁷ Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 62.

dibutuhkan terhitung sehari-hari.³⁸ Lamanya pidana kurungan diatur dalam pasal 18 KUHP.

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Merupakan *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak terkait kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti saling pukul atau berkelahi satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu pengambilan secara paksa kemerdekaan seseorang untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

- d) Denda : merupakan ancaman pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum

³⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 109.

³⁹ A.Z. Abidin Farid, dan Andi Hamzah, **Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 289.

tidak ada ketentuannya. Mengenai denda diatur dalam pasal 30

KUHP.⁴⁰

- e) Kerja Sosial : merupakan jenis pidana sosial yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Dalam penjatuhan pidana selain dipenuhinya syaratnya, juga perlu pertimbangan dan syarat-syarat tertentu. Garis besar mengenai pidana kerja sosial ada dalam rancangan KUHP.⁴¹

3. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan biasanya bersifat fakultatif.

Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.⁴²

Adapun ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :⁴³

- a) Pidana tambahan dapat dijatuhkan di samping pidana pokok dengan syarat tertentu. Dalam artian pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai suatu ancaman yang berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, ada beberapa yang dapat diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁴¹ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 20

⁴² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 111.

⁴³ Hermin Hadiati Koeswati, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 45.

d) Suatu pengancaman secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, mempunyai sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

e) Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif dan juga bersifat sangat khusus sehingga sifat pidananya dapat hilang dan sifat preventif inilah yang diutamakan. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Mengenai pidana tambahan tersebut adalah :⁴⁴

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu (diatur dalam Pasal 35 KUHP)
- 2) Perampasan Barang Tertentu (diatur dalam Pasal 39 KUHP)
- 3) Pengumuman Putusan Hakim (diatur dalam Pasal 43 KUHP)

D. Kajian Umum Mengenai Teori Kriminologi

Untuk membahas masalah kejahatan dengan kekerasan terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis masalah kejahatan yaitu :

a) *Macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan atas pelaku kejahatan. Contoh teori anomie dan konflik.⁴⁵

- 1) Teori Anomie

⁴⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 112.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 71.

Perbuatan manusia dengan melihat bagian-bagian komponennya dalam usahanya mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain, dan melihat tidak terletak pada diri sendiri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai (Emile Durkheim).⁴⁶

2) Teori Konflik

Bahwa teori konflik berasumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan⁴⁷. Namun pada teori ini yang dipertanyakan adalah konsenkuensi dari pembuatan dan penegakan hukum, dimana hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang muncul jika individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.⁴⁸

b) *Microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau

⁴⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 59.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 96.

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, hlm. 104

orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Contoh teori kontrol dan *social learning theory*.⁴⁹

1) Teori Kontrol

Bahwa manusia berusaha mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.⁵⁰

2) *Social Learning Theory*

Bahwa perbuatan manusia difokuskan pada tehnik-tehnik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.⁵¹

c) *Bridging theories*, adalah teori-teori yang tidak sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik makro maupun mikro. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Contoh teori subkultur dan *differential opportunity*.⁵²

1) Teori Subkultur

Bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit*, hlm. 71.

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 87.

⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit*, hlm, hlm. 87.

⁵² Romli Atmasasmita, *Loc.Cit*, hlm. 71.

berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.⁵³

2) *Different Opportunity Theory*

Bahwa orang belajar kejahatan akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.⁵⁴

E. Kajian Umum Mengenai Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindak perilaku sosial yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: (1) perihal/sifat keras, (2) paksaan, dan (3) suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain. Sedangkan menurut penjelasan dalam KUHP pasal 89, kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat. Dalam artian membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan⁵⁵.

⁵³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁵ R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 98.

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan, perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain⁵⁶.

2. Teori-Teori Kekerasan

Menurut Thomas Santoso teori kekerasan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

a) Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok

Para ahli biologi, fisiologi, dan psikologi ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan (*innate*) seperti kelainan genetik atau fisiologis. Mereka meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperhatikan faktor-faktor biologis sebagai faktor penyebab kekerasan. Para ahli teori ini berpendapat bahwa agresi perilaku seseorang dapat menimbulkan kekerasan, sebagai contoh perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat dan harga diri seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (*crowd*).

⁵⁶ Thomas Santoso, **Teori-Teori Kekerasan**, PT. Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, Jakarta, 2002, hlm.11.

Tindak kekerasan kolektif ini biasanya muncul karena adanya benturan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain seperti identitas berdasarkan agama atau etnik. Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok crowd dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama.⁵⁷

b) Teori Kekerasan Struktural

Teori kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori kekerasan struktural memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti aparatur negara.

Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas.

Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.⁵⁸

c) Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 15.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 169.

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Ada beberapa alat alternatif untuk menyatakan atau menyampaikan konflik sosial, untuk menyampaikan masalah kekerasan dengan efektif diperlukan perubahan dalam organisasi sosial dan individu, masalah kekerasan merupakan salah satu pokok permasalahan dari kehidupan modern.⁵⁹

3. Macam-macam Kekerasan

- a) Kekerasan Fisik : merupakan kekerasan nyata yang dilakukan dengan menyerang secara langsung tubuh atau fisik seseorang dan menimbulkan luka atau kematian, seperti pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- b) Kekerasan Psikologis : merupakan kekerasan nyata yang ditujukan pada hati atau jiwa seseorang untuk melemahkan kepercayaan diri mereka, seperti kebohongan, penghinaan, pengancaman, dan penekanan batin.
- c) Kekerasan Struktural : merupakan kekerasan yang dititikberatkan pada stabilitas tertentu dan tidak tampak, dan biasanya dilakukan secara berkelompok atau individu, seperti contoh lemahnya sistem dalam pemerintahan, korupsi, dan kerugian masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 129.

⁶⁰ Thomas Santos, *Loc.Cit.* hlm. 169.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan

- a) Kekerasan Individu : merupakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang dan diarahkan kepada satu individu atau lebih.
- b) Kekerasan Kolektif : merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan.⁶¹
- c) Kekerasan Langsung : merupakan kekerasan yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang ingin dicelakai, kekerasan ini dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.
- d) Kekerasan Tidak Langsung : merupakan kekerasan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana atau objek yang ditentukan, kekerasan ini dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

5. Jenis-Jenis Kekerasan

- a) Kekerasan Terbuka: merupakan kekerasan yang dapat dilihat dan nyata terjadi secara langsung, seperti perkelahian.
- b) Kekerasan Tertutup : merupakan kekerasan yang tersembunyi dalam tindakannya, atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam
- c) Kekerasan Agresif : merupakan kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
- d) Kekerasan Defensif : merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 9.

6. Macam-Macam Perilaku Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Didalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain pasal 338-350 KUHP
- b) Kejahatan Penganiayaan pasal 351-358 KUHP
- c) Kejahatan seperti Pencurian, Penodongan, Perampokan pasal 365 KUHP
- d) Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan pembunuhan
- b) Kejahatan penganiayaan berat
- c) Kejahatan pencurian dengan kekerasan
- d) Kejahatan perkosaan
- e) Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum

F. Kajian Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan

Nama lembaga pemasyarakatan (LAPAS) secara ideal mengandung makna : berperan “memasyarakatkan kembali” para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Secara sosiologis seharusnya lapas tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemberian

sanksi, yang semata-mata dimaksudkan untuk hukuman, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan.⁶²

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap seseorang yang diambil sementara kemerdekaannya dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Fungsinya untuk memperbaiki secara jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam pengertian orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan atau dulu dikenal dengan sebutan Sipir Penjara

⁶² David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howison, **Menyingkap Dunia Gelap Penjara**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. xiii.

⁶³ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 60.

Konsep pemasyarakatan digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Beliau menyatakan bahwa tugas umum kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Setiap tahunnya penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia bertambah, hal tersebut karena faktor ekonomi dan sosial yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.⁶⁴

2. Peraturan Perundangan – Undangan Mengenai Keamanan Lembaga Pemasyarakatan

Selain Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai lembaga pemasyarakatan yaitu :

- a. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

⁶⁴ Wikipedia, **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 18 Maret 2015.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- g. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
- h. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-458.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Natal dan Tahun Baru 2014.

- i. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengeledahan Barang-Barang Terlarang Di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.
- j. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.01.04.02.03 Tentang Hasil Analisa Intelijen dan Penegakan Hukum Satgas Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam merangkai suatu pemecahan permasalahan dan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi⁶⁵, dalam hal ini bagian tersebut merupakan penyelesaian pemecahan permasalahan. Dalam pemecahan permasalahan **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)** . Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dalam penelitian ini lingkungan masyarakat tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II B di Blitar. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 42

Sehingga dengan penelitian empiris dan mengkaji data secara langsung dapat diketahui kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar dalam melindungi dan membina narapidana yang melakukan tindak kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode pendekatan yang tepat, sistematis, dan konsisten. Metode pendekatan penelitian hukum yang penulis lakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundangan-undangan, asas-asas hukum, dan sistem hukum. Serta ditekankan pada diperolehnya keterangan-keterangan yang berkaitan dengan upaya-upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan kepada narapidana. Sedangkan Yuridis Empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, dan nyata, dengan cara mengkaji bahan hukum yang ada yaitu data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan dan dihubungkan dengan keadaan atau kondisi yang terjadi di kenyataan atau kondisi faktual, dalam hal ini keadaan yang nyata pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Blitar dimana adanya kekerasan antar narapidana yang terjadi dalam Lapas tersebut.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam skripsi ini, berdasarkan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar terhadap asumsi yang dipergunakan sebagai dasar jawaban permasalahan pada penelitian skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar yang masih berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan tersebut didasarkan beberapa alasan dan pertimbangan, karena dalam Lapas Klas II Blitar ada masalah kelebihan kapasitas narapidana 200% dan hal tersebut membuat narapidana cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana lain dan adanya *overcapacity* membuat ruang gerak antar narapidana menjadi tidak leluasa terutama saat jam istirahat fasilitas yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak memenuhi. Selain itu alasan pemilihan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, karena jumlah petugas atau pembina dalam Lapas tersebut kurang dari dibandingkan jumlah narapidana tetapi petugas Lapas Klas II B mempunyai ide-ide atau upaya-upaya yang mengantisipasi kekurangannya

tersebut dan memberikan bentuk perlindungan yang tidak biasa dibandingkan Lapas lain.

D. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan merupakan sumber asli, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan⁶⁶. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Diperoleh dari hasil observasi di lapangan, yaitu dari para pihak atau narasumber yang mempunyai informasi tentang adanya kekerasan dalam Lapas Klas II B Blitar, seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, Kepala KPLP, Kepala KASI BINADIK, dan Narapidana Lapas Klas II B Blitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnnya

⁶⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112.

sebelumnya dan merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁶⁷.

Diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun literatur dalam penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan yang hampir sama terkait kekerasan dalam Lapas dan upaya perlindungannya. Data sekunder yang lain berupa bahan-bahan kepustakaan yang berupa Himpunan Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer :

Pengumpulan data primer menggunakan wawancara awal dengan Kepala Lapas untuk mengetahui apakah benar adanya kekerasan dalam Lapas. Lalu mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada Kepala Lapas dan Kepala Divisi Keamanan terkait bentuk perlindungan dan kendala-kendala yang dialami ketika terjadi kekerasan dalam Lapas Kelas II B Blitar.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terbuka atau *face to face*, sehingga mempermudah penulis dalam mengambil informasi yang akurat. Dengan begitu wawancara secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 112.

Blitar dan tanya jawab serta meminta keterangan lebih lanjut untuk mendapatkan data yang faktual.

Selain wawancara dengan Kepala Lapas, pengumpulan data primer menggunakan proses tanya jawab terhadap beberapa narapidana terkait tindak pidana antar narapidana menggunakan angket yang sudah disediakan penulis. Proses tanya jawab menggunakan metode angket, digunakan untuk mengetahui kebenaran mengenai kekerasan yang dilakukan narapidana termasuk dalam faktor-faktor penyebab serta sanksi yang diterima bagi narapidana pidana yang melakukan pelanggaran dan proses upaya lembaga pemasyarakatan dalam menangani tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas melalui pendapat para narapidana termasuk dari segi pembinaan, perlindungan, dan keamanan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder :

Dengan membaca, mengolah data, membrowsing lewat internet dan meneliti hasil penelitian sebelum melalui studi kepustakaan dan litelatur-litelatur terkait kekerasan dan perlindungan dalam Lapas, dan beberapa dokumen dari Lapas serta Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.⁶⁸

Dalam penelitian ini populasi meliputi pembina dan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶⁹

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan responden didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Sampel tersebut adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kepala Sub Seksi Keamanan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kasi Bimbingan/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, dan Narapidana. Sedangkan untuk narapidana sampel di ambil secara *random sampling* yaitu pengambilan responden secara acak.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 118.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 119

c. Responden

Penentuan responden ditentukan oleh peneliti sendiri dari beberapa bagian-bagian populasi yang sekira bagian tersebut terkait dengan permasalahan penelitian.

Terdiri dari :

- 1) Yuli Hartono, Bc., IP., SH. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) 1 Orang
- 2) Bambang Purgiyanto, S.Sos. (Kepala Kesatuan Bagian Tata Usaha) 1 Orang
- 3) Mahfud SH (Kepala Sub Seksi Keamanan) 1 Orang
- 4) Syahril Effendi, A.Md.IP.,SH. (Kepala Bimbingan/Anak Didik dan Kegiatan Kerja) 1 Orang
- 5) Andi Hasyim, A.Md.IP.,SH (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
- 6) 20 Orang Narapidana

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dan penafsiran data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat dalam pemecahan permasalahan yang dianalisis.

Keseluruhan data yang diperoleh baik yang primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis dengan teknik analisis data penelitian secara deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan antar narapidana dalam Lapas. Untuk mempermudah pengolahan data untuk pembahasan digunakan metode deskriptif analisis dengan pemecahan permasalahan yang ada dalam keadaan yang faktual serta dari pembahasan yang sudah diungkap, dari data yang penulis deskripsikan dan analisis data-data yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan berdasarkan jawaban dan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dan diungkapkan secara jelas.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penafsiran dalam penelitian diberikan definisi-definisi terkait yaitu :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum dari aparat penegak hukum atau pembina dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar kepada para narapidana yang berfungsi untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman tindak kekerasan antar narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tindak Pidana

Merupakan perbuatan kekerasan antar narapidana yang dilarang oleh aturan hukum umum dan aturan-aturan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar yang guna untuk mengatur tingkah laku narapidana agar tertib

dan patuh. Apabila dilanggar aturan hukum tersebut maka ada sanksi pidana yang diberikan kepada narapidana-narapidana yang melanggar aturan larangan tersebut.

c. Kekerasan

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memenuhi keinginan diri akan sesuatu, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina dengan atau tanpa menggunakan sarana serta memberikan dampak fisik maupun psikis bagi korban. Dalam kasus ini kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang terjadi antara narapida.

d. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang pernah melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dan menjalani hukuman pidana karena telah berbuat kesalahan atau narapidana yang melanggar peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar dan harus patuh dan taat menerima sanksi sesuai yang ditetapkan atau diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar.

e. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B merupakan tempat dimana terjadi kekerasan antar narapidana yang peneliti pilih menganalisis upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam melaksanakan pengayoman, pembinaan, dan pemasyarakatan narapidana, walaupun lingkup masyarakat yang lebih kecil Lembaga Pemasyarakatan memang belum bisa maksimal dalam memberikan suatu upaya jaminan, bahwa narapidana yang sudah diayomi, dibina, dan dimasyarakatkan kembali itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

1. Sejarah Singkat

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar yang beralamat di Jalan

Merapi No.2 Blitar merupakan bangunan peninggalan Pemerintahan Kolonial

Belanda berdiri sejak tahun 1881 diatas tanah seluas : 6.070 M2, dengan nama

“Rumah Penjara Blitar”. Dalam perkembangannya sejak Era Kemerdekaan RI

tahun 1945 sampai dengan saat ini Rumah Penjara Blitar mengalami beberapa

perubahan nama, antara lain :

- 1) Rumah Penjara Tahun 1881 - 1964;
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan Blitar Tahun 1964 - 1995;
 - 3) Rumah Tahanan Negara Klas II B Blitar Tahun 1995 - 2003;
 - 4) Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar Tahun 2003 – Sekarang;
- berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

R.I No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.

Kondisi Gedung dan Bangunan hampir seluruhnya masih menunjukkan

type/model bangunan asli peninggalan Kolonial Belanda, dimana sejak 3 (tiga)

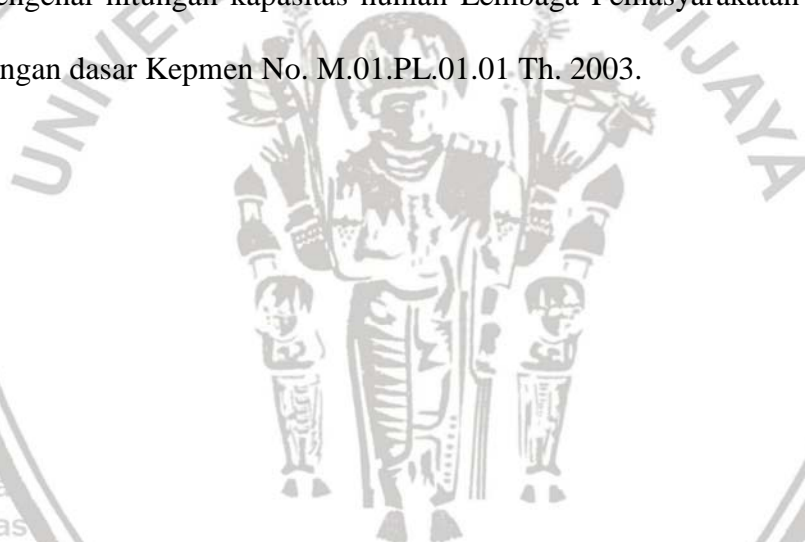
tahun terakhir (2012-2014) tidak mendapatkan anggaran pemeliharaan yang

cukup memadai, sehingga disana-sini diketemukan kondisi bangunan mulai

rapuh, lapuk, bocor dan lain sebagainya, terutama kondisi bangunan gedung

Bimker yang mana kayu gording penyangga atap dan plapannya banyak yang

lapuk, dan jebol sudah sering mengalami beberapa renovasi untuk memenuhi kebutuhan warga binaan dan kualitas Lapas sendiri. Seiring berjalannya waktu jumlah kejahatan semakin bertambah dan dibutuhkan peningkatan keamanan, perlindungan, dan pembinaan yang memadai untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tingginya tingkat kejahatan dan kurang seimbangnya jumlah pembina dengan jumlah narapidana dalam Lapas membuat Lapas mengalami over kapasitas yang tidak bisa dihindari baik untuk tahanan yang sementara dan narapidana. Negara sudah memberi aturan sendiri mengenai hitungan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II Blitar dengan dasar Kepmen No. M.01.PL.01.01 Th. 2003.



Tabel 4.2.

KAPASITAS HUNIAN

HITUNG KAPASITAS HUNIAN :		
Dasar Kepmen No. M.01.PL.01.01 Th. 2003 Tgl. April 2003 (Standar Luas Kamar Hunian = 5,4 m ² /orang)		
BLOK	KAMAR No.	Hasil Pengukuran dari DPU Tgl. 24-4-2015 LUAS (M2)
Blok A	1	64,00
Blok B	1 & 4	265,75
	1-A	
	2, 3-A, 3-B, 4	
	5 & 6	
	Tambahan kamar baru	
Blok C-1	5, 6, 8, 9	660,50
	2 & 3	
	1, 4, 7, 10	
Blok C-2	11, 12, 13, 14, 15	
Blok C-3	17, 18, 20, 21	
	23 & 24	
	16, 19, 22, 25	
Blok D	1 & 2	143,50
JUMLAH	37 Kamar	1.133,75
KAPASITAS HUNIAN Lapas Klas IIB Blitar :		209,95
PEMBULATAN :		210,00

Sumber Data Sekunder, diolah, Tanggal 28 September 2015

Kapasitas Lapas berdasarkan Kepmen No. M.01.PL.01.01 Th. 2003 Tgl. April 2003 (Standar Luas Kamar Hunian = 5,4 m²/orang); dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Nomor : 050/413/410.102/2015 Tgl. 24 April 2015 Perihal Pengukuran Luas Bangunan, Lapas Klas II B Blitar seharusnya hanya mampu menampung

narapidana dan tahanan sekitar 210 orang. Luas kamar hunian seluruhnya :

1.133,75 M2, daya tampung hanya untuk : 210 orang Napi/Tahanan, sementara

itu jumlah WBP per tanggal 30 April 2015 telah mencapai : 369 orang

Napi/Tahanan. Hal ini menunjukkan kapasitas hunian di LAPAS Klas II B Blitar

saat ini telah terjadi over kapasitas hingga mencapai : 56,91%⁷⁰

Tabel 4.3.

KEADAAN JUMLAH NARAPIDANA DAN TAHANAN (Tgl. 31 Maret 2015)

STATUS	REGISTER											JUMLAH
	PIDANA MATI	SEUMUR HIDUP	BII B	BI	BII a	BII Is	AI	AII	AII I	AI V	AV	
NARAPIDANA			1	169	79	3				1		252
TAHANAN							17	26	69	4	1	117
JUMLAH			1	169	79	3	17	26	69	4	1	369

Sumber Data Sekunder, diolah, pada 26 Oktober 2015

Keterangan :

- 1) BIIB yaitu narapidana dengan vonis dibawah 6 bulan;
- 2) BI yaitu narapidana dengan vonis lebih dari 1 (satu) tahun;
- 3) BIIA yaitu narapidana dengan vonis antara 6 bulan – 1 tahun;
- 4) BIIIS yaitu narapidana dengan vonis subsider;
- 5) AI yaitu tahanan dari Kepolisian;
- 6) AII yaitu tahanan dari Kejaksaan;
- 7) AIII yaitu tahanan dari Pengadilan;

⁷⁰ Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, di akses pada tanggal 25 Oktober 2015.

- 8) AIV yaitu tahanan dari Pengadilan Tinggi;
- 9) AV yaitu tahanan dari Kasasi.

Dari jumlah total narapidana dan tahanan 369 orang, penulis mengambil responden narapidana secara random berjumlah 20 orang dari total narapidana 252 orang untuk pengisian angket yang berisi mengenai upaya, kendala, dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II B Blitar.

Tabel 4.4.

JENIS – JENIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA RESPONDEN

NO.	TINDAK PIDANA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	UU. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba	6	30%
2.	UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	4	20%
3.	UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	10%
4.	Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 KUHP	2	10%
5.	Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP	2	10%
6.	Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 340 KUHP	1	5%
7.	Tindak Pidana Pencurian Pasal 365 KUHP	1	5%
8.	UU. No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai	1	5%
9.	UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1	5%
JUMLAH		20	100 %

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan sumber data primer, hasil pengambilan responden narapidana secara *random*/acak dengan total 20 orang responden narapidana, dengan menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan, narapidana pelaku kejahatan Narkoba lebih mendomisili Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dengan

jumlah 6 orang narapidana pelaku Narkoba, sedangkan sisannya 4 orang narapidana pelaku tindak kekerasan pada anak-anak, masing-masing 2 orang narapidana tindak pelaku korupsi, penadahan, dan penganiayaan, dan masing 1 orang narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan, pencurian, bea cukai dan korupsi.

Keadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas LAPAS Klas II B Blitar (seperti peralatan Kantor, Meja kantor, Kursi, Almari Arsip, Komputer, Printer dan lain sebagainya) sampai dengan saat ini jumlahnya sangat terbatas dan hampir seluruhnya dalam kondisi “hanya siap dipakai” akan tetapi kurang maksimal.



Tabel 4.5.

KEADAAN PERALATAN INVENTARIS KANTOR

NO	JENIS BARANG/SUB.KEL BARANG	JUMLAH YANG ADA	KONDISI			RENCANA KEBUTUHAN	KET
			BAIK	RR*	RB**		
PERALATAN DAN MESIN							
1	PERSONAL KOMPUTER	10	6	0	4	10	
2	LAPTOP	7	2	2	3	12	
3	MESIN ABSENSI/FINGER SCANNER	1	0	1	0	4	
4	PESAWAT TELEFON / MESIN FAXIMILE	1	0	1	0	4	
NO	JENIS BARANG/SUB.KEL BARANG	JUMLAH YANG ADA	KONDISI			RENCANA KEBUTUHAN	KET
			BAIK	RR	RB		
5	PRINTER	11	9	3	0	6	
6	MONITOR CCTV	3	3	0	0	8	
7	KAMERA CCTV	24	24	0	0	16	
8	LAMPU SOROT	0	0	0	0	8	
9	HANDY TALKY	15	10	0	5	20	
10	AC SPLIT	4	2	0	2	10	
11	Meja Kantor	26	26	0	0	15	
12	Kursi Kantor	26	26	0	0	15	
13	Kursi Lipat	120	120	0	0	30	
14	Rak / Almari Arsip	12	12	0	0	5	
15	SICE	2	1	1	0	5	
16	AMBULANCE	0	0	0	0	1	
17	MOBIL Operasional Kantor	1	0	1	0	1	
18	Mobil TRANSPAS	0	0	0	0	1	
19	Sepeda Motor Dinas	1	1	0	0	12	

Sumber Data Sekunder, diolah, Tanggal 28 September 2015

Keterangan :

*RR : Rusak Ringan

**RB : Rusak Berat

Sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas dan pembinaan untuk para narapidana sangatlah penting selama menjalani kehidupan dalam Lapas.

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar antara lain:

- a) Blok A, B, C1, C2, C3, D1, D2;
- b) Ruang Kepala Lapas;
- c) Ruang Pegawai;
- d) Ruang Tamu;
- e) Ruang Tata Usaha;
- f) Ruang Band;
- g) Masjid;
- h) Gereja;
- i) Lapangan Voli;
- j) Ruang Besuk atau Kunjungan;
- k) Wartel (Warung Telepon);
- l) Koperasi Lapas;
- m) Aula;
- n) Ruang Bengkel Kerja;
- o) Poliklinik.

2. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib Pemasyarakatan.

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

- 1) Mewujudkan tata tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder* (seseorang yang mempunyai minat dan kepentingan dalam suatu perusahaan atau lembaga).

c. Motto Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

BRANTAS “ Bersih-Rapih-Aman-Nyaman-Tentram dan Asri “

- 1) BERSIH: bersih adalah sebagian dari iman, karenanya seoptimal mungkin melaksanakan peningkatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, ruang-ruang kantor, blok

hunian, kamnar hunian, dapur, bimker dan tempat beribadah serta semua fasilitas yang dimiliki, agar dengan lingkungan yang bersih akan dengan mudah membersihkan hati, sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan agama yang dianut dan ketentuan yang berlaku

2) RAPIH : merupakan keadaan yang menggambarkan adanya sistem kerja yang tertata dengan baik, teratur, bersih, menyenangkan dan harmonis, sehingga dari keadaan yang rapih ini diharapkan akan mampu memacu semangat setiap petugas untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

3) AMAN : keadaan yang menggambarkan adanya rasa aman, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, keadaan yang pasti atau tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tidak merasa takut atau khawatir dan yang mampu memberikan perlindungan aman, tentran dan kondusif kepada masyarakat yang diberi pelayanan adalah merupakan kondisi yang dicitakan untuk selalu terwujud di LAPAS Klas IIB Blitar agar seluruh tugas dan fungsi LAPAS dapat bekerja dengan tertib dan lancar.

4) NYAMAN : keadaan yang menggambarkan adanya kondisi rasa sejuk dan nyaman yang enak untuk melakukan aktifitas kegiatan kantor maupun interaksi dan kegiatan-kegiatan

WBP didalam LAPAS secara sehat, yang akan terus dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap petugas demi terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAS secara efektif dan efisien.

- 5) TENTRAM : suatu keadaan yang menggambarkan lingkungan kantor dan lingkungan kerja yang kondusif yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi petugas dan WBP yang diberi pelayanan.
- 6) ASRI : keadaan lingkungan kantor yang indah, bersih dan sedap dipandang mata, akan selalu diwujudkan dari hasil kerja secara bersama untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi LAPAS secara transparan dan akuntable.⁷¹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar adalah melaksanakan pemasyarakatan Narapidana atau Anak Didik.

b. Fungsi Lapas

- 1) Melakukan pembinaan kepada narapidana atau anak didik;
- 2) Memberikan kegiatan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana serta mengelola hasil kerja narapidana atau anak didik;
- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

⁷¹ Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, di akses pada tanggal 29 September 2015

- 4) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dalam LAPAS.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut kadangkala mengalami kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, kurang maksimalnya kinerja pembina karena kurangnya sumber daya manusia yang kurang mencukupi dibanding dengan jumlah narapidana maupun tahanan, mahalnya biaya rekonstruksi LAPAS, dan minimnya sarana yang tersedia mempengaruhi penilaian publik terhadap performa keseluruhan LAPAS dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

4. Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

- 1) Dilarang Membawa Narkoba;
- 2) Dilarang Membawa Handphone atau Alat Komunikasi Lain;
- 3) Dilarang Membawa Senjata Tajam maupun Senjata Api;
- 4) Dilarang Membawa Kamera atau Alat Perekam Lainnya;
- 5) Dilarang Membawa Peralatan Berat dari Luar.

Tata tertib tersebut berlaku bagi keseluruhan pihak narapidana, tahanan, dan yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

5. Kegiatan Narapidana Selama Berada Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Pada pukul 03.00 WIB, para narapidana yang ditugaskan untuk pengurusan dapur dikeluarkan terlebih dahulu dari bloknya, selain narapidana pengurus dapur narapidana lain tidak boleh keluar. Pada pukul 07.00, dilakukan pembukaan blok yang dilakukan oleh petugas Lapas. Para narapidana dan tahanan dibebaskan melakukan aktivitas di dalam ruang lingkup Lapas, termasuk mendapatkan kunjungan dari keluarga, mengambil sarapan, serta berolahraga ringan. Setelah aktivitas pagi diselesaikan pada pukul 12.00 WIB para narapidana dan tahanan serta pegawai Lapas mempersiapkan diri untuk sholat Dzuhur berjamaah bagi yang Non-Islamizinkan berdoa di tempat yang sudah disediakan pihak Lapas. Di dalam Lapas Klas II B Blitar sholat Dzuhur selalu dilaksanakan berjamaah tidak harus pada hari Jumat saja. Pada pukul 13.00 WIB para narapidana dan tahanan masuk ke dalam bloknya masing-masing untuk istirahat siang atau hanya sekedar bercengkrama sesama narapidana atau dengan petugas penjaga. Pukul 15.00 WIB para narapidana diizinkan istirahat, sholat, dan makan (ISOMA). Pukul 15.30 para narapidana dan tahanan di masukan kembali ke dalam bloknya masing-masing. Pada pukul 17.45 para narapidana dan tahanan mempersiapkan diri untuk sholat Maghrib bagi yang beragama Islam dan bagi yang Non-Islamizinkan istirahat dalam bloknya masing-masing.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015.

Setiap hari Senin dan Kamis ada pembinaan bidang rohani dan jasmani.

Pada pukul 08.00 WIB diadakan kegiatan pengenalan huruf Arab. Pada pukul

11.30 WIB ada kegiatan ceramah dari Kemenag. Setiap hari Selasa pukul

07.30-08.00 WIB ada kegiatan Asmaul Husna, Yasin, dan Tahlil. Pada hari

Senin dan Rabu ada kegiatan Rebana Religi tiap pukul 08.00 WIB. Setiap hari

Sabtu pukul 07.30-08.00 WIB ada kegiatan Istighosah Qotmil Qur'an setiap

Minggu ke 2 dan ke 4. Dan biasanya pada hari Sabtu setelah berjamaah Sholat

Dzuhur ada Ceramah Kultum.

Bagi yang Non-Islam setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 09.00-11.30 WIB ada Kebaktian di Gereja Lapas.

Setiap hari Kamis pukul 08.00 WIB keseluruhan narapidana dan tahanan wajib mengikuti kegiatan Kamis Bersih. Setiap hari Jumat pukul 07.30-08.30

WIB ada kegiatan paling ditunggu oleh para narapidana dan tahanan, yaitu

Senam Kesegaran Jasmani. Secara keseluruhan bentuk pembinaan bidang

rohani dan jasmani ini bertujuan untuk menghilangkan penat narapidana dan

tahanan agar tidak bosan dan stress, serta kegiatan-kegiatan positif tersebut

mampu mengembangkan dan menguatkan keimanan para narapidana dan

tahanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.⁷³

Mengenai beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas, pelayanan pelayan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar

⁷³ Hasil wawancara dengan Syahril Efendi selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, dilaksanakan pada 25 Oktober 2015.

dibidang Pembinaan kepada Narapidana secara garis besar dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :⁷⁴

- 1) Layanan Pembinaan Kepribadian;
- 2) Layanan Pembinaan Kemandirian;
- 3) Layanan Pemasyarakatan dalam hal pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, Remisi serta asimilasi.

Dalam hal Layanan Pembinaan Kepribadian diberikan kepada seluruh Narapidana LAPAS Klas II B Blitar dalam bentuk kegiatan : pembinaan Keagamaan, Kepramukaan, Kesenian, Olah raga, Bimbingan Konselling, Perpustakaan, Penyuluhan Hukum, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta Pembinaan kepribadian kependidikan. Walaupun disana-sini baik ragam jenis dan kualitasnya dipandang masih perlu ditingkatkan, namun secara umum seluruh program kegiatan pembinaan kepribadian tersebut diatas telah dijalankan dengan cukup baik.

Dalam hal pemberian Layanan Pembinaan Kemandirian kepada Narapidana diberikan melalui 3 (tiga) pokok kegiatan yaitu : Pembinaan Kemandirian bidang Industri maupun Manufaktur (pembuatan keset sabut kelapa) belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan masih adanya pembenahan Rehab Ruang Kerja (BIMKER) yang mana pada kondisi awal bangunannya banyak mengalami kerusakan sehingga apabila tidak dilakukan renovasi akan menguatkirkan keselamatan WBP saat bekerja, sedangkan untuk Pembinaan Kemandirian bidang Pertanian dan Perkebunan (kebun nanas) dan

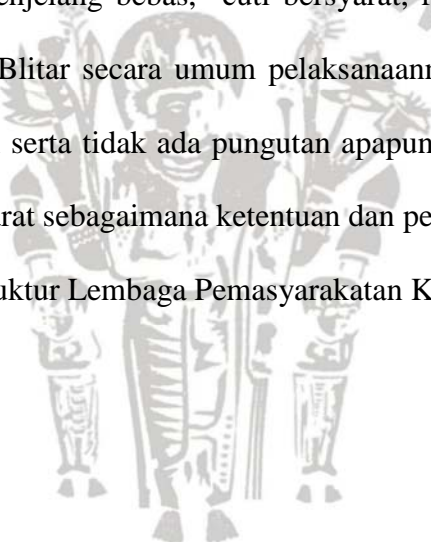
⁷⁴ Hasil wawancara dengan Syahril Efendi selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada 25 Oktober 2015.

Pembinaan Kemandirian bidang Perikanan dan Peternakan (budidaya ikan air tawar Lele) telah berjalan dengan cukup lancar. Akan tetapi semua kegiatan

Pembinaan Kemandirian tersebut secara umum dapat dikatakan masih berjalan “apa adanya”, belum diketemukan adanya inovasi baru terhadap output yang dihasilkan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada dari dalam berdasarkan hasil assesment terhadap Napi atau Tahanan serta keadaan pangsa pasar dewasa ini.

Sedangkan pemberian layanan pemasyarakatan dalam hal pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, remisi serta asimilasi di LAPAS Klas II B Blitar secara umum pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan transparan serta tidak ada pungutan apapun kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.

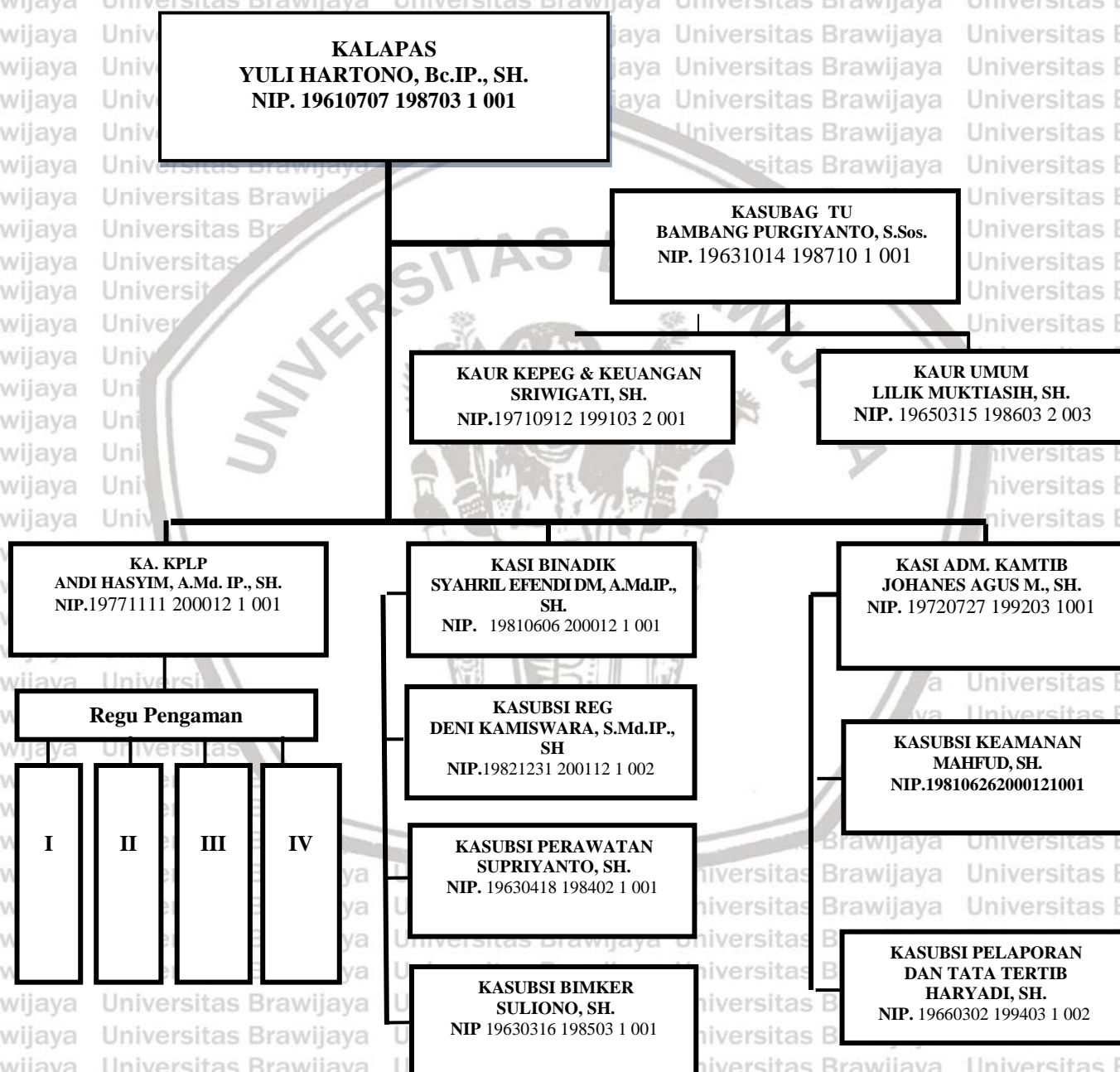
Berikut susunan struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar :



BAGAN 4.1

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II

B BLITAR



Sumber Data Sekunder, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan bagan struktur Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, jumlah pegawai dalam Lapas dibagi sebagai berikut :

Tabel 4.6.

Jumlah Kepegawaian Per-Bulan April 2015

No.	Nama Jabatan	Banyak
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1 Orang
2.	Kasubag TU	1 Orang
3.	Kepala Kesatuan Pengamanan	1 Orang
4.	Kepala Seksi	2 Orang
5.	Kepala Urusan	2 Orang
6.	Kepala Sub Seksi	5 Orang
7.	RUPAM (4x7)	28 Orang
8.	P2U (4x1)	4 Orang
9.	JFU/JFK	32 Orang
	JUMLAH	76 Orang

Sumber Data Sekunder, diolah, pada 26 Oktober 2015

Kebutuhan jumlah personil di hampir semua UPT Pemasyarakatan (LAPAS) masih sangat jauh dari jumlah kebutuhan yang ideal, perbandingan jumlah narapidana dan tahanan sampai sekarang ini 369 orang dibandingkan dengan jumlah personil pihak Lapas 76 orang yang terjadi di LAPAS Klas II B Blitar. Keadaan ini menuntut setiap Pimpinan harus mampu mengelola Sumber daya Manusia yang tersedia secara lebih optimal. Untuk mengetahui kekuatan

sumber daya manusia yang tersedia di LAPAS Klas II B Blitar saat ini Tabel 4.5 menjelaskan mengenai keadaan pendidikan terakhir pegawai dalam Lapas.

Tabel 4.7.

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	SM	S1	S2	S3
1	Laki Laki		1	45		16		76
2	Perempuan			10		4		
	Jumlah		1	55		20		

Sumber Data Sekunder,. diolah, pada 26 Oktober 2015

Berdasarkan tabel jenis kelamin dan pendidikan, keadaan pegawai Lapas dengan total 76 orang jumlah pegawai laki-laki lebih mendominasi 80% dari pada pegawai perempuan yang mendominasi sekitar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai dalam Lapas. Dari jumlah total 76 orang pegawai dibagi golongannya berdasarkan pendidikan ditentukan pangkatnya sesuai Tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH ORANG
Pembina	IVA	1
Penata TK I	IIID	4
Penata	IIC	8
Penata Muda TK I	IIIB	35
Penata Muda	IIIA	10
Pengatur TK I	IID	3
Pengatur	IIC	8
Pengatur muda TK I	IIB	-
Pengatur Muda	IIA	2
CPNS		5
JUMLAH		76

Sumber Data Sekunder , diolah, pada 26 Oktober 2015

Pegawai dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar jumlah tersebut sangatlah berbanding jauh dengan jumlah narapidana dan tahanan. Tetapi dengan keterbatasan tersebut tidak menjadikan penghalang bagi pembina Lapas untuk dapat memberikan yang terbaik buat membina narapidana dan tahanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.01.PR.07.03 TAHUN 1985 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

a) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- 2) Urusan Umum.

b) Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan;
- 2) Sub Seksi Perawatan;
- 3) Sub Seksi Bimbingan Kerja.

c) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Keamanan;
- 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

d) Kesatuan Pengamanan Lapas, terdiri dari Petugas Pemasyarakatan.

Uraian tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar adalah sebagai berikut :

1.1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Tugas : Mengkoordinasi pembinaan Kegiatan Kerja, Administrasi

Keamanan dan Tata Tertib serta pengelolaan Tata Usaha meliputi

Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan

Pemasyarakatan Narapidana dan Anak didik Lembaga

Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

1.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : Pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

1.3 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas : Melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

1.4 Kepala Urusan Umum

Tugas : Pengurusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1.5 Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Tugas : Membimbing narapidana dan Anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana dan Anak didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik.

1.6 Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Tugas : Pembuatan dan mengatur data statistik dan dokumentasi

Narapidana atau Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Blitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyelenggarakan pembinaan mental atau rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi kepada Narapidana/Anak didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

1.7 Kepala Sub Seksi Perawatan

Tugas : Penyelenggaraan perawatan Narapidana atau Anak didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

1.8 Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja

Tugas : Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana/Anak didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat.

1.9 Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas : Mengkoordinasikan Kegiatan Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas, dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta

suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Blitar.

1.10 Kepala Sub Seksi Keamanan

Tugas : Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban,
mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan
pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar
terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

1.11 Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas : Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan
data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar.

1.12 Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Tugas : Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai
jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar kepada atasan.

Hak-hak yang wajib didapat Narapidana telah diatur dalam Pasal 14 ayat

- (1) UU No. 12 tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 dan lebih khusus lagi
diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang diperoleh Narapidana selama menjalani masa pemidanaan.

- 1) Melakukan Ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing narapidana;
- 2) Mendapatk perawatan rohani dan perawatan jasmani;
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan atau curhatan hati;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan Remisi;
- 10) Mendapatkan Asimilasi termasuk Cuti;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Upaya-upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas

II Blitar dalam Menangani Tindak Kekerasan Antar Narapidana dalam Lapas.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam mencegah dan menanggulangi terjadi tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas, dibagi menjadi dua cara, yaitu secara represif dan preventif. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan, sedangkan upaya pencegahan preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Lapas.

Upaya pencegahan dan penanggulangan secara preventif dapat berupa :

- 1) Memberitahu tentang hak-hak dan kewajiban serta larangan terhadap narapidana maupun tahanan;
- 2) Memberikan pembinaan, pengarahan, dukungan, wawasan dan pengetahuan terhadap narapidana maupun tahanan;
- 3) Memberikan sarana dan prasana untuk memenuhi kebutuhan narapidana maupun tahanan;
- 4) Memberikan keamanan yang layak bagi narapidana maupun tahanan;
- 5) Memberikan pengarahan hukum agar narapidana maupun tahanan menjadi sadar hukum;

- 6) Memberikan suasana nyaman dan tertib dengan saling berinteraksi antara pembina dengan narapidana maupun tahanan agar tercipta kerukunan;
- 7) Melakukan sholat berjamaah yang rutin tidak hanya pada hari Jumat saja;
- 8) Memberikan pedoman dan pengarahan rohani kepada narapidana maupun tahanan;
- 9) Mengadakan senam kesehatan jasmani dengan mengundang instruktur senam untuk membuat semangat para narapidana maupun tahanan agar terhibur;
- 10) Menunjuk narapidana tertentu untuk menjadi Tamping untuk mengawasi dari dalam.
- 11) Pemasangan CCTV di setiap sudut Lapas

Upaya pencegahan dan penanggulangan secara represif dapat berupa :

- 1) Menghukum sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
- 2) Memberikan pengaman tambahan di tiap blok yang bermasalah;
- 3) Melakukan pengecekan tiap bilik di blok setiap 1 jam sekali setelah pukul 21.00;
- 4) Melakukan pemindahan narapidana yang bermasalah dari blok ke blok yang lain;
- 5) Menambah tamping untuk memberikan keamanan ekstra dari dalam;
- 6) Melakukan pemindahan narapidana ke Lapas lain.

Tindak kekerasan antar narapidana bisa terjadi, karena dimana lingkungan Lapas bukanlah lingkungan pada umumnya dimana masyarakat bersosialisasi dan tidak menutup kemungkinan untuk narapidana melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya karena hal-hal tertentu, untuk mencegah hal tersebut pihak Lapas diharuskan memberikan pelayanan perlindungan kepada narapidana untuk menciptakan lingkungan Lapas yang damai dan tentram.

Tabel 4.9.

BENTUK PELAYANAN PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PIHAK LAPAS KEPADA NARAPIDANA MENURUT JAWABAN NARAPIDANA RESPONDEN

NO.	BENTUK PERLINDUNGAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Diberikan pembinaan khusus	8	35%
2.	Diberikan sel khusus	0	0%
3.	Diberikan tambahan pengawasan	5	10%
4.	Diberikan bonus atau remisi	2	5%
5.	Lain-lain	10	50%
	JUMLAH	25	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan jawaban narapidana responden dari hasil angket mengenai pelayanan perlindungan yang diberikan kepada narapidana oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, yang dimaksud dengan pembinaan khusus adalah pembinaan kepada narapidana yang mempunyai bakat dan minat tertentu sebagai contoh dalam bidang seni pembuatan arsitektur mainan, pembuatan akik, dan musik. Sedangkan tambahan pengawasan adalah pengawasan tambahan terhadap narapidana korban dari pelaku pelanggaran dan pengawasan tersebut biasanya dilakukan oleh Tamping. Bonus dan remisi sudah berlaku wajib bagi setiap narapidana yang berperilaku baik dan potongan

hari nasional, namun masih banyak kendala mengenai pemberian bonus dan remisi. Selain hal-hal tersebut ada 5 orang narapidana responden yang memberikan respon jawaban sendiri dan ada yang memberikan jawaban lebih dari satu jawaban, antara lain yaitu :

- 1) Pemberian saran dari pihak Lapas untuk narapidana yang dituntut lebih oleh Kejaksaan;
- 2) Adanya poliklinik yang disediakan pihak Lapas untuk memberikan pertolongan pertama;
- 3) Pemberian tanggapan atau bantuan oleh pembina kepada narapidana yang mempunyai masalah pribadi;
- 4) Pemberian hak untuk melaporkan apabila ada penyelewengan kegiatan;
- 5) Peningkatan kualitas makanan narapidana.

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, pihak Lapas yang berwenang adalah KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan).

KPLP mengontrol segala bentuk keamanan dan mengevaluasi narapidana yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi keputusan hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran juga dilakukan oleh KPLP dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6

Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Selain memberikan sanksi pihak KPLP Lapas juga wajib memberikan perlindungan kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas.

Tabel 4.10.

**BENTUK PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PIHAK LAPAS
KEPADA NARAPIDANA KETIKA TERJADI KEKERASAN ANTAR
NARAPIDANA MENURUT JAWABAN NARAPIDANA RESPONDEN**

NO.	BENTUK PERLINDUNGAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Diberikan penanganan khusus	0	0%
2.	Diberikan penjagaan keamanan lebih atau khusus	2	10%
3.	Dipindahkan dari sel satu ke sel yang lebih aman	7	25%
4.	Dibubarkan menggunakan sirine atau alat lain	0	0%
5.	Lain-lain	15	65%
	JUMLAH	24	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan upaya-upaya perlindungan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar untuk mencegah dan menanggulangi adanya tindak kekerasan antar narapidana, menurut narapidana responden ada beberapa upaya yang paling efektif yaitu penggunaan pemuka atau tamping sebagai penengah apabila terjadi tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas, jika penggunaan pemuka dan tamping kurang membantu, maka pihak Lapas akan menurunkan personil regu pengaman untuk menstabilkan kondisi Lapas dan mengamankan pelaku pelanggaran. Selain penggunaan tamping upaya perlindungan yang paling sering digunakan adalah melakukan pemindahan narapidana dari sel satu ke sel yang lain atau dipindah dari blok awal ke blok lainnya. Penanganan tertentu diberikan kepada narapidana jika narapidana pelaku atau korban dari tindak kekerasan antar narapidana menimbulkan dendam atau melakukan pengulangan tindak pidana kepada

narapidana lain. Sanksi isolasi diberikan kepada narapidana pelaku pelanggaran berat, hal tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada narapidana.

Ketika ada narapidana melakukan tindak kekerasan dan terbukti bersalah maka regu pengamanan berhak mengantisipasi dan melakukan pengamanan terhadap narapidana yang bermasalah dan segera melaporkan kepada KPLP untuk memproses lebih lanjut. KPLP akan meninjau tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memprosesnya secara berkala. Apabila tindak kekerasan yang dilakukan menimbulkan korban maka narapidana yang bersangkutan akan dimutasi ke Lapas lain demi menjaga keamanan narapidana lain yang belum menjadi sasaran barunya. Jika narapidana yang bersangkutan hanya melakukan pelanggaran berat maka dengan segera sanksi yang diberikan adalah di masukan kedalam sel isolasi selama 12 hari dan tidak boleh menerima kunjungan selama 15 hari. Jika pelanggaran ringan saja KPLP akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai.⁷⁵

Pihak Lapas juga memberikan upaya berupa regu pengamanan yang membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan antar narapidana dan membantu keamanan Lapas. Selain regu pengamanan penggunaan sistem keamanan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2013 Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu, Pemuka dan Tamping. Lapas Klas II Blitar mempunyai

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

kriteria sendiri dalam melakukan pengangkatan Pemuka dan Tamping untuk membantu dan meringankan kinerja pihak keamanan Lapas

Tabel 4.11.

**BENTUK PELAYANAN KEAMANAN YANG DIBERIKAN PIHAK
LAPAS KEPADA NARAPIDANA MENURUT JAWABAN NARAPIDANA
RESPONDEN**

NO.	BENTUK KEAMANAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Adanya penjagaan di tiap sudut LAPAS	6	25%
2.	Adanya pembatas antar sel	1	5%
3.	Adanya batas waktu tertentu saat menerima kunjungan	0	0
4.	Adanya sosialisasi antar petugas keamanan dengan narapidana	7	30%
5.	Lain-lain	9	40%
	JUMLAH	23	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan jawaban angket narapidana responden mengenai pelayanan keamanan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, penjagaan di tiap sudut Lapas merupakan bentuk pelayanan keamanan yang sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan antar narapidana, karena menutup ruang gerak narapidana agar tidak berulah.

Pembatasan antar sel harus diperhatikan betul-betul oleh pegawai Lapas, karena pembatas tersebut tidak menutup kemungkinan dibobol oleh narapidana. Waktu kunjungan merupakan hal paling ditunggu-tunggu narapidana namun masih banyak kendala mengenai lamanya waktu kunjungan.

Sosialisasi antara narapidana dan petugas merupakan suatu keadaan untuk menciptakan keadaan aman dan damai, karena adanya kerja sama dalam hal

baik antara petugas dengan narapidana terutama pada Pemuka dan Tamping.

Selain hal-hal tersebut ada 3 narapidana responden yang memberikan jawaban

lebih dari satu jawaban dan ada yang memberikan jawaban tersendiri, yaitu :

- 1) Peraturan dalam jam istirahat diperketat dengan penjagaan dan pengawasan dari luar dan dari dalam blok;
- 2) Pemberian baju identitas untuk membedakan narapidana, tahanan, dan tamping;
- 3) Penggunaan pemuka dari pihak narapidana untuk mendisiplinkan narapidana;
- 4) Penggunaan narapidana khusus atau yang dipilih tertentu untuk membantu kerja pembina di kawasan tertentu, contoh : dapur, kantor, tempat kunjungan, dan kebersihan;
- 5) Pengadaan apel pagi, siang, sore, dan malam oleh pembina dan regu pengaman.

Pelayanan keamanan dengan menggunakan Pemuka dan Tamping sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2013 Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pemuka merupakan narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di dalam Lapas, sedangkan Tamping merupakan narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Pengangkatan

Pemuka dan Tamping harus sesuai dengan syarat Pasal 5 dan 7, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2013 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Proses pengangkatan

Pemuka atau Tamping harus berdasarkan rekomendasi TPP Lapas. Namun adakalanya pihak Lapas melakukan pengangkatan Tamping dengan melihat perilaku atau karakter tertentu yang ada pada narapidana yang akan diangkat tapi dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan walau melewati beberapa syarat.⁷⁶

Penggunaan Pemuka dan Tamping disamping membantu pihak Lapas dalam pembinaan karena adanya over kapasitas, mereka juga dapat membantu beberapa hal seperti, ditempatkan dalam bengkel kerja, kebersihan blok, memasak di dapur, membantu mengawasi saat kunjungan, dan kebersihan lingkungan Lapas. Masing-masing diberikan warna rompi baju yang berbeda oleh pihak Lapas Klas II B Blitar untuk mempermudah dalam mengawasi kinerja Pemuka dan Tamping. Apabila ada seorang Pemuka atau Tamping melakukan pelanggaran maka pihak Lapas berhak mencabut jabatannya sebagai Pemuka maupun Tamping.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar sampai sekarang masih berusaha melakukan perkembangan pelayanan secara menyeluruh untuk mengoptimalisasikan segala fungsi yang ada dalam Lapas Klas II B Blitar, seperti :

1) Peningkatan fungsi Layanan Pembinaan Narapidana;

Ditujukan untuk membina kepribadian dan kemandirian narapidana agar memiliki sikap patuh terhadap peraturan, patuh terhadap nilai-nilai

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

etika dan norma-norma agama, sehingga narapidana dapat menerima kenyataan yang ada dengan ikhlas yang akhirnya mereka akan mau dan mampu mengikuti dan menerima segala proses pembinaan kepribadian yang diberikan dari pihak Lapas Klas II B Blitar serta meningkatkan kemampuan individual narapidana dengan pelatihan kemandirian di bidang yang dikuasai.

2) Peningkatan fungsi Layanan Perawatan Narapidana maupun Tahanan;

Ditujukan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan fungsi layanan perawatan terhadap narapidana dan tahanan dengan program dukungan operasional tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan meliputi kebutuhan sandang dan pangan.

3) Peningkatan fungsi Layanan Informasi dan Komunikasi kepada Publik;

Ditujukan pada dinamika masyarakat yang cepat sebagai akibat dari kemajuan sistem teknologi informasi yang menuntut pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan terukur, karena itu untuk terlaksananya hal tersebut diperlukan peningkatan pada unit layanan informasi, pengaduan, kunjungan, dan pengelolaan SDP dalam Lapas Klas II B Blitar agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat secara langsung dirasakan oleh publik.

4) Peningkatan fungsi Layanan Keamanan dan Ketertiban didalam Lapas;

Merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya seluruh layanan yang akan diberikan kepada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di dalam

Lapas adalah faktor kondusifitas keamanan dan ketertiban kehidupan WBP didalam Lapas perlu ditingkatkan dengan menggandeng aparat keamanan (POLRI, BNN) setempat. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari layanan keamanan dan ketertiban didalam Lapas dapat juga dicapai dengan kegiatan pengawainan, razia dan penggeledahan, pemenuhan sarana dan prasarana KAMTIB, dan operasional internal.

5) Peningkatan fungsi Layanan Perkantoran;

Ditujukan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan terukur tidak akan dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak dibarengi dengan Layanan Perkantoran yang baik, teratur dan tertib. Demikian pula kegiatan Layanan Pembinaan Kemandirian tidak dapat berjalan efektif apabila kondisi bangunan/gedung Ruang Bimbingan Kerja (BIMKER) yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan Layanan Perkantoran (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) tersebut mengalami banyak kerusakan. Oleh sebab itu kegiatan Layanan Perkantoran perlu ditingkatkan keprofesionalismenya demi untuk menunjang seluruh Layanan yang akan diberikan kepada WBP.

6) Peningkatan fungsi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan;

Ditujukan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan terukur tidak akan dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak ditunjang dengan

tersedianya anggaran yang memadai. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan pelaporan yang baik demi tersusunnya Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang mampu menampung semua Rencana Kerja dan penganggarnya secara tepat, maksimal.

Sedemikian rupa bentuk peningkatan dan upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar untuk memberikan bentuk pelayanan dari Lembaga Negara yang berupa Lapas demi kepuasan penghuni Lapas dan publik agar tidak selalu merealisasikan bahwa Lapas merupakan tempat yang mengerikan dan selalu dianggap buruk dimata masyarakat sebagai tempat penampungan kejahatan. Pihak Lapas sendiri mengusahakan memberikan bentuk pembinaan-pembinaan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada umumnya.

Tabel 4.12.

**BENTUK PELAYANAN PEMBINAAN YANG DIBERIKAN PIHAK
LAPAS KEPADA NARAPIDANA MENURUT JAWABAN NARAPIDANA
RESPONDEN**

NO.	BENTUK PEMBINAAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Mendapatkan waktu tambahan untuk berolahraga dan istirahat untuk ibadah	9	25%
2.	Mendapatkan bimbingan pendidikan dan pengajaran	9	25%
3.	Menerima kunjungan dari keluarga	2	5%
4.	Mendapatkan pelayanan kesehatan baik fisik maupun mental	2	5%
5.	Lain-lain	11	40%
	JUMLAH	33	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan jawaban narapidana responden mengenai pelayanan pembinaan yang diberikan kepada narapidana oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

B Blitar, pembinaan dalam agama diutamakan karena merupakan inti dasar dari pembinaan yang lain. Pendidikan dan pengajaran kepada narapidana

disesuai dengan minat dan bakat narapidana agar narapidana tidak merasa

bosan dengan pembinaan yang monoton atau berulang-ulang. Menerima

kunjungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sudah menjadi kewajiban

Lapas untuk memberikan yang terbaik kepada narapidana. Selain itu ada 13

narapidana responden memberikan respon jawaban tersendiri dan memberikan

jawaban sendiri mengenai pelayanan pembinaan, antara lain :

- 1) Pembangunan karakter yang disesuaikan keinginan narapidana;

- 2) Pembinaan antisipasi dan sosialisasi;
- 3) Pembinaan ekonomi kreatif;
- 4) Penyesuaian minat dan bakat narapidana;
- 5) Pembagian pembinaan agama yang dianut disesuaikan waktunya dan saling menjaga kerukunan beragama;
- 6) Pembinaan kesenian;
- 7) Pembinaan olah raga (jasmani dan rohani).

Sebagai wujud dari upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Layanan Pembinaan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tentang “Peningkatan Pembinaan Keterampilan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar”. Penandatanganan MOU dilakukan oleh BUPATI Blitar (Herry Nugroho) dan KALAPAS Klas II B Blitar (Yuli Hartono, Bc.IP., SH) pada hari SELASA/25-11-2014. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun. Adanya penandatanganan MOU dengan Bupati Blitar tentang kerja sama, maka terhitung mulai tahun anggaran 2015 para Kepala SKPD Kabupaten Blitar mulai menindaklanjuti kegiatan teknis sesuai Tusi masing-masing SKPD yang bersesuaian dengan kerangka untuk Peningkatan Pembinaan Keterampilan Dan Perawatan Kesehatan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

B Blitar, yaitu antara lain kegiatan yang dilakukan untuk saling mendukung dalam Pembinaan⁷⁷ :

- 1) Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam bidang Pembinaan Keagamaan ; kegiatan pembinaan dibidang keagamaan di LAPAS Klas II B Blitar dilakukan secara bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar melalui penugasan mubaliq, dan penceramah pada saat ibadah keagamaan (agama Islam dan Kristen).
- 2) Kerjasama dengan Kantor Perpustakaan Nasional Indonesia Propinsi JATIM ; dalam hal penyediaan buku-buku bacaan untuk di perpustakaan LAPAS Klas II B Blitar.
- 3) Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Blitar, dengan Dinas Pertanian Kab. Blitar dan dengan Dinas Perikanan/ Peternakan Kabupaten Blitar dalam hal Pembimbingan s/d. pemasaran hasil kerja para Napi dibidang : Industri/ Manufaktur, Pertanian/Perkebunan dan Perikanan/Peternakan.
- 4) Kerjasama dengan PT. TELKOM dalam bidang peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi kepada Publik dan WBP.
- 5) Kerjasama dengan Kepolisian Resort Blitar Kota (POLRESTA Blitar) dalam bidang peningkatan Keamanan dan Pembinaan POLSUSPAS.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Yuli Hartono selaku Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015.

- 6) Kerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar; dalam bidang assesment dan penanggulangan kecanduan Narkoba Napi/Tahanan serta dalam hal pencegahan serta pemberantasan Narkoba di LAPAS Klas II B Blitar
- 7) Kerjasama dengan Kepoisian dan BNN Kabupaten Blitar; dalam pencegahan masuknya barang terlarang (Senjata dan atau obat-obatan terlarang) kedalam LAPAS Klas II B Blitar melalui penggeledahan/Razia bersama kepada penghuni LAPAS Klas II B Blitar.
- 8) Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar; dalam bidang Penyuluhan tentang bahayanya Penyakit menular termasuk HIV / AID kepada WBP LAPAS Klas II B Blitar.
- 9) Kerjasama dengan BRI Cabang Blitar; dalam bidang Penerapan Kartu BRIZI bagi WBP dalam rangka menciptakan lingkungan LAPAS Klas II B Blitar bebas dari peredaran Uang Tunai (WBU).

Segala bentuk kerjasama dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh warga yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, walaupun masih ada banyak kendala-kendala yang mengganjal untuk menuju ke pelayanan yang diinginkan.

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Antar Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

Kekerasan identik dengan kekuasaan atau penyerangan terhadap kebebasan seseorang yang dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Pelaku kekerasan cenderung melakukan agresi penyerangan sewenang-wenang tanpa menghiraukan keadaan korban dan tidak menghiraukan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut.

Terjadinya kekerasan didalam Lapas akan membawa dampak negatif, kekerasan dalam Lapas yang terjadi antara perorangan (narapidana) dapat membuat suasana dalam Lapas menjadi tidak kondusif, apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat memicu kekerasan secara berkelompok sehingga mengganggu narapidana lain dan dapat menurunkan reputasi Lapas karena dianggap tidak mampu mengatasi tindak kekerasan antar narapidana.

Ada beberapa perbedaan bentuk kekerasan yang terjadi dalam Lapas Kelas II B Blitar, sebelum tahun 1992 dan sampai sekarang. Kekerasan yang terjadi sebelum tahun 1992 cenderung menimbulkan korban yang lebih banyak dan situasi yang ditimbulkan sulit terkontrol dengan baik. Berbeda dengan sekarang, banyaknya perubahan pada sistem yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan juga berbeda dengan yang dulu dan adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur, antisipasi mengenai tindak kekerasan antar

narapidana dapat dikontrol jauh lebih baik dan jarang menimbulkan korban luka berat.⁷⁸

Tabel 4.13.

TINDAK KEKERASAN DARI TAHUN KE TAHUN

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	PROSENTASE
1.	1990 - 1995	22 KASUS	35%
2.	1996 - 2000	17 KASUS	25%
3.	2001 - 2005	11 KASUS	20%
4.	2006 -2010	8 KASUS	15%
5.	2010 - 2015	3 KASUS	5%
		JUMLAH	100%

Sumber Data Primer, di olah, Tanggal 22 Februari 2016

Berdasarkan presentase tabel tersebut tindak kekerasan dalam lapas Blitar dari tahun ke tahun jumlah kasusnya menurun. Upaya penanggulangan tindak kekerasan antar narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar menunjukan hasil yang signifikan dan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina yang baik dapat tercapai.

Ada beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar narapidana beberapa tahun belakangan ini. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan narapidana akan diberi sanksi tegas. Sanksi dapat berupa pencabutan remisi atau pemindahan sel. Semua sanksi diproses dari keputusan pengadilan bagi pelanggaran berat.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016.

Tabel 4.14.

**JENIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN NARAPIDANA
PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEKERASAN ANTAR
NARAPIDANA**

No.	Penyebab Terjadinya Kekerasan Antar Narapidana	Jumlah Kejadian
1.	Penganiayaan pasal 351,353, dan 358	25%
2.	Pemerasan dan Pengancaman pasal 368	10%
3.	Penggelapan pasal 372	5%
4.	Perbuatan Curang pasal 378	40%
5.	Penghinaan pasal 310	20%
JUMLAH		100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 22 Februari 2016

Setiap tindakan pelanggaran pidana yang dilakukan narapidana mempunyai sanksi tersendiri bagi para narapidana pelaku pelanggaran tindak pidana dalam Lapas. Pihak Lapas sendiri mempunyai tindakan antisipasi untuk mengatasi setiap narapidana pelaku pelanggaran tindak pidana penyebab terjadinya kekerasan. Segala tindak pidana akan diberikan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan dan proses pemberian sanksi dilakukan dengan proses pelaporan dari KPLP dan keputusan dari Kepala Lapas untuk penindakan selanjutnya bagi pelaku pelanggaran di Pengadilan.

Apabila pihak Lapas masih mampu menangani narapidana pelaku pelanggaran dan narapidana pelaku masih dapat dibina dengan sanksi yang diberikan Lapas, maka narapidana pelaku pelanggaran tindak pidana hanya akan menerima sanksi dari Lapas saja. Namun apabila narapidana pelaku pelanggaran tindak pidana sudah terlalu dalam melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran berat, maka keputusan dari Lapas diputus melalui Pengadilan.

Ada dua jenis pelanggaran dalam kekerasan yang terjadi dalam Lapas, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan, dan setiap pelanggaran yang dilakukan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁸⁰ Namun sekarang tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II Blitar sering dipicu beberapa faktor-faktor tertentu.

Tabel 4.15.

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEKERASAN
ANTAR NARAPIDANA MENURUT JAWABAN NARAPIDANA
RESPONDEN**

NO.	FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Tidak terima kawan diperlakukan tidak adil oleh napi lain	2	10%
2.	Saling mengejek/menghina antar napi	4	20%
3.	Berebut makanan, minuman, atau rokok antar napi	0	0%
4.	Rasa dendam atau iri antar napi	1	5%
5.	Lain-lain	13	65%
JUMLAH		20	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan keterangan jawaban hasil angket mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar narapidana menurut jawaban narapidana responden narapidana, saling ejek atau menghina antar narapidana merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya kekerasan antar narapidana dalam Lapas, sedangkan perlakuan tidak adil oleh narapidana lain dan rasa iri merupakan faktor penyebab lainnya yang sering memicu terjadinya kekerasan antar

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

narapidana. Sedangkan dari 20 narapidana 13 diantaranya memiliki jawaban tersendiri yaitu antara lain :

- 1) Utang-piutang antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Kecemburuan sosial dan ekonomi, karena penampilan kalah menarik dari narapidana lain;
- 3) Masuknya obat-obatan dari luar;
- 4) Tidak suka dengan teman sekamar yang pemalas atau tidak suka bersih-bersih;
- 5) Tidak diberikan jatah harian hasil besukan;
- 6) Perbedaan pendapat antar narapidana;
- 7) Mencari-cari kesalahan dari narapidana lain untuk menghilangkan stress.

Pelanggaran berat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan keamanan serta ketertiban didalam Lapas. Sebagai contoh yaitu menerima barang (Narkoba) dari pihak luar, membawa telepon seluler (HP) dalam Lapas, pemukulan terhadap narapidana maupun tahanan, serta diketahui ada masalah utang piutang antar narapidana. Pelanggaran tersebut apabila dilakukan akan menerima sanksi yang sangat tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, contoh sanksi yang diberikan dapat berupa pemindahan dari Lapas, dimasukkan dalam sel isolasi selama 12 hari dan tidak boleh menerima

besukan selama 15 hari. Karena pelanggaran berat dapat merugikan pihak Lapas dan Narapidana maupun Tahanan sendiri.⁸¹

Sedangkan untuk pelanggaran ringan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan yang dapat menyebabkan timbulnya rasa iri atau cemburu dan mengganggu ketertiban dalam Lapas. Sebagai contoh, narapidana tidak mengikuti proses pembinaan, seorang narapidana ketahuan berkunjung ke blok khusus tahanan tanpa izin, tidak menggunakan seragam yang sudah disediakan saat keluar blok, diketahui suka mengambil barang milik orang lain, dan segala tingkah laku yang dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban narapidana lain. Sanksi dari pelanggaran ringan tersebut disesuaikan dengan pelanggaran dan perbuatannya, kadang-kadang apabila narapidana pelaku baru pertama melakukan kesalahan masih dapat dimaafkan, namun jika sudah sering dan keterlaluhan maka sanksi yang diberikan pun berbeda. Sanksi itu pun dapat berupa olahraga fisik (Push Up, Sit Up, dan jalan jongkok), berjemur santai (Berdiri di Lapangan), dan bersih-bersih.⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

⁸² Hasil wawancara dengan Andi Hasyim selaku KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

Tabel 4.16.

**BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU KEKERASAN
ANTAR NARAPIDANA MENURUT NARAPIDANA RESPONDEN**

NO.	BENTUK SANKSI	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Dipukul atau diberi sanksi kekerasan fisik	1	5%
2.	Ditahan atau dimasukkan dalam sel sendiri (Isolasi)	11	45%
3.	Disuruh kerja paksa	0	0%
4.	Disuruh kerja bakti dilapangan	1	5%
5.	Tidak boleh mendapat kunjungan keluarga	6	15%
6.	Tidak diperbolehkan berinteraksi dengan napi lain	3	10%
7.	Jatah makan dan minum dikurangi	0	0%
8.	Lain-lain	9	20%
	JUMLAH	31	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan keterangan jawaban hasil angket mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada narapidana menurut narapidana responden, sanksi isolasi paling sering diberikan oleh pihak Lapas kepada narapidana pelaku pelanggaran didalam Lapas. Dan tidak boleh menerima kunjungan dari keluarga merupakan sanksi yang membuat depresi para narapidana, karena membuat mereka kekurangan persediaan jajan. Dari hasil tersebut ada 11 orang narapidana responden yang menjawab lebih dari satu jawaban. Selain sanksi yang disebutkan diatas ada beberapa sanksi yang pernah diberikan pihak Lapas sendiri kenapa narapidana, yaitu antara lain :

- 1) Jalan Kodok;
- 2) Sanksi Fisik berupa Sit Up, Push Up, dan Lari dilapangan;
- 3) Dijemur selama beberapa menit untuk pelanggaran ringan;
- 4) Dipindah kamar atau blok

5) Dipotong rambutnya atau digundul.

Narapidana sendiri memberi penilaian mengenai berat tidaknya sanksi yang diberikan oleh petugas Lapas, karena setiap sanksi-sanksi yang diberikan memberikan pelajaran tersendiri buat para pelaku pelanggaran.

Tabel 4.17.

**PENDAPAT NARAPIDANA RESPONDEN MENGENAI BOBOT SANKSI
YANG DIBERIKAN**

NO.	BOBOT	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	RINGAN	4	20%
2.	SEDANG	7	35%
3.	BERAT	9	45%
	JUMLAH	20	100%

Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 28 September 2015

Berdasarkan keterangan jawaban hasil angket mengenai pendapat narapidana responden mengenai sanksi yang diberikan kepada mereka dari total 20 orang narapidana, 4 orang narapidana diantaranya merasa bobot sanksi yang diberikan terlalu ringan mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan sanksi yang diberikan dan tidak merasa jera dengan keadaanya. 7 orang narapidana merasa bobot sanksi yang diberikan terasa cukup sedangkalan sisanya mengatakan bobot sanksi yang diberikan terasa terlalu berat mungkin karena mereka sudah terlalu depresi dan tidak kuat dengan keadaanya dalam Lapas. Sanksi isolasi dirasa paling berat, sedangkan sanksi-sanksi yang lain seperti sanksi fisik menurut narapidana responden dirasa sedang atau cukup, akan tetapi pihak Lapas sendiri akan memberikan sanksi hukuman lebih berat apabila narapidana maupun tahanan melakukan pelanggaran yang berulang-ulang dan upaya pengendalian dengan pembinaan dirasa gagal.

Timbulnya tindak kekerasan antar narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar dilatarbelakngani oleh beberapa faktor penyebab yaitu :

- 1) Adanya Over Kapasitas dari Lapas;
- 2) Adanya masalah utang piutang atau pinjam meminjam antar narapidana maupun tahanan;
- 3) Adanya dendam antar Narapidana;
- 4) Pengambilan paksa hak atau barang milik narapidana lain;
- 5) Kurangnya Prasarana dan Sarana dalam Lapas;
- 6) Kurangnya Interaksi antar Narapidana dan Pembina;
- 7) Pikiran narapidana yang terbebani (Stress);
- 8) Kecemburuan sosial dan ekonomi;
- 9) Lamanya masa pidana atau depresi karena Vonis;
- 10) Lamanya pengurusan surat PB, CMB, dan CB;
- 11) Mendapatkan kabar buruk dari luar, misal : Surat Cerai, Keluarga Meninggal;
- 12) Pemanfaatan kreatifitas kurang ditinjau;
- 13) Adanya orang luar yang balas dendam dengan menggunakan orang dalam;
- 14) Rasa iri terhadap Tamping;
- 15) Kurangnya kendali mengenai perbal (berita acara) oleh pihak kepolisian dan Jaksa.

Dari faktor-faktor tersebut faktor penyebab yang paling sering terjadi kekerasan antara narapidana adalah rasa iri dan dendam, para narapidana sekarang cenderung melakukan kekerasan karena rasa iri hal ini disebabkan karena adanya pembatasan-pembatasan kreatifitas narapidana dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam Lapas Klas II B Blitar, hal itu membuat narapidana gusar dan kurang kegiatan selain kegiatan sehari-hari yang sudah dijadwalkan oleh pihak Lapas.

Sebelumnya kekerasan tidak hanya terjadi hanya karena hal-hal berat seperti yang disebutkan. Dulu dari tindakan sepele seorang narapidana seperti *Mlirik'i* (Memandang dengan pandangan menantang) bisa menimbulkan kekerasan antar narapidana yang sangat rusuh, sampai menimbulkan korban luka. Namun, sekarang sudah jarang terjadi karena perkembangan nama dari Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan.⁸³

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan antar narapidana, dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari luar dan menyebabkan narapidana melakukan kekerasan dalam Lapas. Dalam hal ini mencakup keadaan sosial dan ekonomi narapidana, yaitu tidak mendapat kunjungan, mendapat kabar buruk dari keluarga, sulitnya pengurusan surat-surat, adanya dendam dari pihak luar, dan lamanya vonis yang dijatuhkan.

Sedangkan faktor intern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari dalam untuk melakukan tindak kekerasan. Dalam hal ini

⁸³ Wawancara dengan Narapidana, Inisial B, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

mencakup kebutuhan narapidana dan lingkungan Lapas, yaitu over kapasitas yang membuat kamar menjadi kurang nyaman dan penuh, kurangnya interaksi antar narapidana dan pembina menjadi sering salah paham antara satu dengan yang lain, pengambilan paksa hak atau barang milik narapidana lain, rasa iri terhadap narapidana lain yang mendapat kunjungan atau iri dengan Tamping, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan masalah utang piutang dan pinjam meminjam antar narapidana.

Dapat dimaklumi bila sering terjadinya kekerasan antar narapidana dalam Lapas, karena sebagian besar narapidana merupakan orang-orang yang pendidikannya kurang bukan berarti mereka bodoh dan mudah terpancing emosi, selain itu kebanyakan dari mereka sudah depresi berat akibat vonis dan gejolak perubahan kehidupan yang tidak normal seperti biasanya dimana jauh dari orang-orang yang disayangi. Pihak Lapas sendiri akan berusaha sekeras mungkin untuk membina dan mendidik para narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara.⁸⁴

C. Kendala-kendala yang Dialami Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II Blitar dalam Menangani Tindak Kekerasan Antar Narapidana dalam

Lapas.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban serta pemantauan atas kinerja dan program, setiap satuan kerja dibawah jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Syahril Effendi Kasi Binadik dan Gianja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

secara periodik wajib menyampaikan laporan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada Pimpinan, yang dituangkan melalui Potret Kegiatan yang disusun setiap tiga bulan (Triwulan). Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh setiap Satker dibawah Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur adalah terciptanya Sistem Kerja Kepemerintahan yang lebih baik. Sistem Kerja Kepemerintahan yang lebih baik tersebut harus terus diperjuangkan untuk dicapai melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Secara garis besar tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar adalah “Melaksanakan Pemasyarakatan narapidana atau anak didik”. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut kadangkala mengalami kendala dan hambatan. Berdasarkan pemberitaan dimedia elektronik pada tiga bulan terakhir penilaian integritas Layanan Pemasyarakatan dibeberapa Lapas mengalami penurunan sehubungan dengan masih diketemukannya peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba) yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam dan kekerasan antar narapidana dari dalam Lapas. Kondisi demikian akan mempengaruhi penilaian publik

terhadap performa seluruh Lapas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.⁸⁵

Ada beberapa kendala yang sedang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dalam menindaklanjuti tindak kekerasan antar narapidana, yaitu :

- 1) Kondisi bangunan Lapas yang kurang memadai dimana sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk jumlah narapidana yang semakin banyak. Hal tersebut memicu narapidana untuk melakukan pelanggaran dengan mencari sarana dan prasarana yang ada di blok lain, hal itu dapat memicu tindak kekerasan antar penghuni blok. Sudah jelas tertulis dalam peraturan bahwa narapidana maupun tahanan dilarang memasuki blok lain tanpa izin. Selain hal tersebut kondisi bangunan yang mulai rapuh dan butuh pembenahan di beberapa tempat untuk lebih amannya dan pemenuhan hak narapidana dan demi menjaga keamanan narapidana dari lapuknya kondisi Lapas.
- 2) Over kapasitas dalam Lapas membuat kesulitan dalam pengawasan dimana jumlah petugas dan narapidana maupun tahanan berbeda jauh, sehingga membuat pihak Lapas kewalahan dalam menindaklanjuti narapidana jika ada yang melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut memicu tindak kekerasan dalam bilik di tiap blok, karena kondisi kamar bilik yang seharusnya hanya dapat menampung 8-12 orang di isi menjadi 15-20 orang narapidana. Hal tersebut membuat narapidana

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bambang Purgiyanto, selaku Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015

merasa sesak dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pihak Lapas dan membuat mereka berbuat tindak kekerasan karena berebut tempat. Dan pihak Lapas kekurangan regu pengamanan dan membuat kondisi semakin memburuk.

3) Jumlah regu pengamanan yang kurang di masing-masing jadwal yang sudah ditentukan, hal tersebut membuat satu regu dalam pengamanan kerja ekstra 2X dalam satu hari untuk melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Dengan pengangkatan pemuka dan tamping yang seharusnya dapat membantu regu pengamanan dan beberapa pihak Lapas untuk meringankan kerja mereka, hal tersebut pun menimbulkan masalah baru di pihak narapidana. Karena jabatan sebagai pemuka atau tamping tersebut mengangkat derajat seorang narapidana untuk bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana maupun tahanan karena merasa mempunyai kekuasaan langsung dan dibawahhi oleh KPLP. Hal tersebut memicu narapidana melakukan tindak kekerasan terhadap pemuka atau tamping yang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana lain. Kadang-kadang narapidana lain iri melihat pemuka atau tamping yang diangkat karena mereka merasa narapidana yang diangkat menjadi pemuka atau tamping tersebut belum pantas diberi jabatan tersebut dan akhirnya memicu mereka melakukan tindak kekerasan.

4) Belum adanya psikolog untuk membantu narapidana ketika mengalami depresi berat atau beban secara mental akibat menjalani kehidupan

dilingkungan yang berbeda untuk pertama kali, atau narapidana yang mengalami depresi karena masalahnya ketika di dalam Lapas. Karena depresi yang tidak tertahankan hal tersebut memicu narapidana yang depresi melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana lain untuk meluapkan emosinya.

- 5) Minimnya peralatan inventaris dalam kantor membuat kurang cepatnya pelayanan perkantoran Lapas dalam pengurusan PB, CMB, dan CB.

Karena kondisi tersebut narapidana yang seharusnya sudah dapat dibebaskan masih harus menunggu surat pembebasannya, dan di lain kondisi ada tahanan dan narapidana baru yang masuk diterima Lapas. Ketidaksesuaian antara narapidana yang diterima dan yang dikeluarkan membuat over kapasitas dalam Lapas dan semakin membuat depresi bagi narapidana yang seharusnya sudah dapat dibebaskan, hal tersebut semakin memburuk ditambah sistem pelayanan yang kurang tanggap dan efektif dan memicu tindak kekerasan dan pelanggaran narapidana dalam Lapas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya – Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar dibagi menjadi dua yaitu, secara represif dan preventif. Upaya secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan, sedangkan upaya pencegahan preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Lapas.

Upaya Represif :

- 1) Pemberian Sanksi Tegas;
- 2) Pengamanan Secara Beregu;
- 3) Pengecekan Berjadwal oleh Regu Pengaman;
- 4) Isolasi atau Mutasi bagi Narapidana yang Bermasalah;
- 5) Penggunaan Pemuka dan Tamping.

Upaya Preventif :

- 1) Melakukan pengenalan Hak dan Kewajiban Narapidana;
- 2) Melakukan Pembinaan Narapidana atau Anak Didik;
- 3) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 4) Melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik;

- 5) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- 6) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- 7) Peningkatan kualitas Layanan Pembinaan terhadap Narapidana;
- 8) Peningkatan kualitas layanan Perawatan terhadap Narapidana dan Tahanan;
- 9) Peningkatan kualitas layanan Informasi dan Komunikasi kepada publik;
- 10) Peningkatan kualitas layanan Keamanan dan Ketertiban didalam LAPAS;
- 11) Peningkatan kualitas layanan Perkantoran;
- 12) Peningkatan kualitas Perencanaan penganggaran dan Pelaporan.

2. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Antar Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan

Faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan antar narapidana dalam Lapas Klas II B Blitar, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari luar Lapas dan menyebabkan narapidana melakukan kekerasan dalam Lapas. Sedangkan faktor intern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari dalam Lapas untuk melakukan tindak kekerasan.

Faktor Ekstern :

- 1) Kondisi Sosial Ekonomi;
- 2) Tindak Mendapat Kunjungan;
- 3) Dendam dari Orang Luar;
- 4) Kabar Buruk dari Keluarga;

5) Lamanya Vonis;

6) Sulitnya Pengurusannya Surat-surat dan Pengadilan.

Faktor Intern :

1) Overkapasitas;

2) Keadaan Sarana Prasana Lingkungan;

3) Utang Piutang;

4) Pemerasan;

5) Rasa Iri;

6) Kurangnya Sosialisasi antara Narapidana dan Petugas.

7) Lamanya Pengurusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Remisi, dan Asimilasi.

3. Kendala – Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak kekerasan antar narapidana dalam Lapas, dihambat oleh kendala sistem dalam pemasyarakatan itu sendiri. Pihak pemerintah sendiri kurang merespon penuh mengenai peningkatan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar yang sudah mereka upayakan demi tercerminnya Lembaga Pemasyarakatan yang baik di mata masyarakat. Sarana dan Prasarana masih dibawah angka cukup untuk memenuhi kebutuhan anak

didik dan tidak hanya sarana dan prasarana untuk narapidana maupun tahanan, namun sarana dan prasarana untuk pekerja yang di kantor Lapas juga mengalami kekurangan peralatan untuk mengupayakan kinerja yang lebih baik. Gejala over kapasitas yang perlu dibenahi kekurangan dana dalam perluasan dan perbaikan Lapas yang sejak zaman kolonial Belanda sudah banyak yang mengalami perombakan dan masih perlu banyak perbaikan lagi. Masih banyak kendala personil, dimana kurang memenuhi syarat-syarat pendaftar untuk bekerja di kantor Lembaga Pemasyarakatan, membuat kondisi pelayanan kantor menjadi kurang cepat dalam pengurusan surat-surat. Hiburan untuk narapidana untuk mengisi kejenuhan waktu luang juga kurang, untuk penambahan wawasan melalui televisi terkendala biaya listrik yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Segala peningkatan pelayanan yang sedang diupayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan dari pihak Pemerintah dan Masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

- 1) Pemerintah seharusnya mampu berbuat lebih dalam mengatasi masalah yang saat ini sering menimpa Lembaga Pemasyarakatan karena pemerintahan merupakan kunci utama dan merupakan atasan bagi lembaga negara seperti Lembaga Pemasyarakatan dalam negeri, terutama masalah over kapasitas dalam Lapas dan merupakan pemicu utama terjadi tindak kekerasan antar narapidana. Proses pemutusan vonis seharusnya mampu dipercepat oleh pihak pemerintah terutama dalam sidang Pengadilan. Waktu yang terlalu diulur-ulur oleh pihak Kejaksaan membuat kewalahan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan terpaksa menampung tahanan dan narapidana yang belum mendapat keputusan Hakim. Hal tersebut menyebabkan over kapasitas berlebihan.
- 2) Pemerintah setidaknya memberikan perundang-undangan tertentu yang mengatur sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan, terutama mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan yang melakukan pelanggaran dalam Lapas. Walaupun sudah ada acuan mengenai pengaturan tersebut tapi setidaknya dikhususkan, karena masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan sanksi terlalu berlebihan kepada narapidana yang melakukan kekerasan disamping hukuman yang sudah disediakan. Dengan demikian hak-hak narapidana berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan tujuan mengenai sanksi diberikan menjadi lebih

tegas dan jelas. Karena dengan adanya peraturan yang mengatur secara keseluruhan dan mengikat, dengan peraturan tersebut diharapkan dapat memberi kesadaran para narapidana maupun tahanan yang melakukan tindak kekerasan dalam Lapas. Karena para narapidana dan tahanan akan mengetahui secara menyeluruh mengenai adanya hak, kewajiban, dan sanksi yang diterima oleh mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan dengan mengetahui hal tersebut mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Saran-saran yang dapat diberikan untuk mengatasi tindak kekerasan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, yaitu :

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dapat menjalin kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar dengan Kepolisian. Dengan kerja sama dengan pihak Kepolisian diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, terutama untuk mengatasi tindak kekerasan antar narapidana dan diharapkan dapat membantu proses pembinaan dan pengarahan kepada narapidana untuk lebih mengerti mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar tercipta suasana yang kondusif dan aman dalam Lapas;
- 2) Memberikan *quality time* atau waktu tertentu bagi narapidana yang bertempat tinggal jauh saat menerima kunjungan dari keluarganya;

- 3) Memberikan sarana bilik asmara untuk para narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, agar tidak depresi atau tertekan akibat keinginan mereka yang jauh dari pasangan hidupnya;
- 4) Menyediakan sarana dokter psikologis atau tempat untuk menyampaikan curahan hati atau keluh kesah narapidana maupun tahanan\;
- 5) Meningkatkan kemampuan para pegawai pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menguasai bela diri untuk mengantisipasi saat terjadi kekerasan dalam Lapas, disaat regu pengaman kekurangan personil;
- 6) Melakukan pendekatan secara personal antara narapidana maupun tahanan dengan petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya kerukunan antara warga binaan dengan pembinanya dan mengurangi adanya kesalahpahaman antara keduanya.

Dengan begitu citra Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebelah mata dan selalu memberi kesan buruk terhadap penghuninya, dimana setiap ada narapidana yang habis masa hukumannya keluar dari Lapas selalu dipandang sebelah mata oleh publik dan dianggap belum bisa diterima oleh masyarakat umum. Dengan segala peningkatan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar diharapkan tidak ada lagi masyarakat umum yang memandang sebelah mata Lembaga Pemasyarakatan dan penghuninya.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU :

A.Z. Abidin Farid, dan Andi Hamzah, **Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan**

Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum

Penitensier, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Adam Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2011.

Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1995.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 1997.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2002

C.I Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta,

1995.

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai

Pustaka, Jakarta, 1989.

David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howison, **Menyingkap Dunia**

Gelap Penjara, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2002.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban**

Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT.

Refika Aditama, Bandung, 2006.

E.Y Kanter & S.R Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, 2002.

Hermin Hadiati Koeswati, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995.

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus**, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007

L.J van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradanya Paramita, Jakarta, 1990

Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009

P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selektia Kriminologi (Edisi Revisi)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Alumni, Bandung, 1996.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty
Yogyakarta, 2003.

Tien S. Hulukati & Gialdah Taptiansari B, **Hukum Pidana Jilid 1**, Universitas
Pasundan, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikiro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2003.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

PERATURAN :

**Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan
Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**

**Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan**

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

**172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan
Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik**

**Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah
Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia**

SKRIPSI :

**Astrid Azizy, Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta
Upaya Penanggulangannya Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di
Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya), Malang, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2013.**

INTERNET :

**Hukum Online, Hak Tahanan dan Narapidana Yang Tak Boleh
Ditelantarkan,**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> diakses pada tanggal
18 Maret 2015

Napi1708, Kekerasan Dalam Lapas,
<http://externalnapi.blogspot.com/2007/05/kekerasan-dalam-lapas.html>
diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Tempo, LP Pemuda Tangerang Rusuh,
<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/18/064571564/LP-Pemuda-Tangerang-Rusuh> diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 24 Maret 2015

Viva News, **Kronologi Kerusuhan Lapas Tulungagung**,

[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434554-kronologi-kerusuhan-](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434554-kronologi-kerusuhan-lapas-tulungagung)

[lapas-tulungagung](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434554-kronologi-kerusuhan-lapas-tulungagung) diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Wikipedia, **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**,

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada

tanggal 18 Maret 2015.

